

ETIKA POLITIK AKBAR TANDJUNG



S K R I P S I

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam
(S.Fil.I)**

Oleh:

**ABBAS
NIM : 0151 0774**

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**



PENGESAHAN
Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1894/2008

Skripsi / Tugas dengan judul : Etika Politik Akbar Tandjung

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

1. Nama : Abbas
2. NIM : 01510774

Telah dimunaqasyahkan pada hari : kamis,tanggal : 30 Oktober 2008
dengan nilai : 85 / A/B
dan telah dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP: 150 235 497

Pengaji I

Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
NIP: 150 235 497

Pengaji II

Fahruddin Faiz, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 298 986

Yogyakarta, 30 Oktober 2008



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
NIP: 150 232 692



DEPERTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta 55221

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Abbas
NIM : 0151 0774
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan Prodi : Aqidah dan Filsafat
Alamat Rumah : Jl. Kesehatan No 12 RT/RW 02/04 Kec. Sungai batang
Kab. Inhil, Riau
Telp / Hp : 081328193987
Alamat Yogyakarta : Dsn. Maguwo No. 07B RT/RW 02/45 Kel. Maguwoharjo
Kec. Depok Sleman Yogyakarta
Judul Skripsi : **Etika Politik Akbar Tandjung**

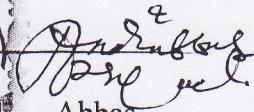
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya susun sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (bulan). Terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (bulan) maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2008

Saya yang menyatakan

600
ENAM RIBU
Tgl. 20
BALE
METE TEMPET

Abbas
0151 0774

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 25 Oktober 2008

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Abbas
NIM	:	0051 0774
Jurusan	:	Aqidah Filsafat
Judul Skripsi	:	Etika Politik Akbar Tandjung

Maka kami selaku Pembimbing / Pembantu Pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. M. Sudin, M.Hum
NIP. 150 239 744

Pembantu Pembimbing

Dr. Munawar Ahmad, M.Si
NIP. 150 321 646

M O T T O

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ . وَلَوْكُنْتَ فَظًا غَلِيظًا الْقُلُوبِ لَأَنْقَضُوا
مِنْ حَوْلِكَ . قَاعِفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَأْوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ . فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ اللَّهِ . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .
<آل عمران\3\159>

Yang artinya,
Mereka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, dan apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Al-imran\3\159.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan

Untuk Negeri pertiwi yang bernama “INDONESIA”.

ABSTRAK

Di Indonesia, politik seringkali mendapatkan citra negatif sebagai dunia yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moral. Praktik politik dijalankan dengan mengabaikan kaidah moral, sehingga kekuasaan berjalan di luar koridor etika. Akibatnya, politik menjadi ranah yang penuh dengan praktik-praktik kotor seperti korupsi, kolusi, nepotisme, janji-janji kosong, hingga tindakan saling sikut dan intimidasi. Citra negatif dunia politik di Indonesia semakin dikuatkan oleh hasil berbagai survei yang menempatkan institusi-institusi politik sebagai salah satu entitas terkorup di negeri ini.

Di tengah kesan negatif semacam itu, Akbar Tandjung muncul sebagai sosok politikus yang dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai aktor politik yang punya integritas moral, santun, berakhhlak mulia, serta sangat akseptabel dan lincah dalam berpolitik. Akbar dinilai bukan hanya sebagai tokoh politik yang telah menempatkan dirinya sebagai seorang politikus Indonesia yang piaui, tetapi juga mendasarkan praktik dan kegiatan politiknya di atas landasan-landasan moral dan prinsip-prinsip etika yang rasional dan teruji.

Di dalam penelitian ini, etika politik yang disuarakan dan dipraktikkan oleh Akbar Tandjung, dicermati secara historis dan struktural. Pendekatan historis digunakan untuk menganalisa data biografi Akbar Tandjung dan data yang menjelaskan kronologi perkembangan akademik wacana etika politik. Sedangkan pendekatan struktural digunakan untuk menganalisa dimensi-dimensi etika politik yang diusung oleh tokoh ini. Masing-masing pendekatan tersebut mengantarkan penulis pada temuan-temuan berikut ini.

Melalui pendekatan historis ditemukan bahwa etika politik merupakan bagian dari pembahasan etika khusus yang membahas prinsip-prinsip dasar etika dalam hubungannya dengan kewajiban manusia di ranah politik. Etika politik telah dikenal sejak masa Yunani Kuno dan berkembang hingga masa modern. Pertanyaan yang mau dijawab oleh etika politik adalah soal bagaimana seharusnya bentuk lembaga-lembaga kenegaraan dan apa yang seharusnya menjadi tujuan dan sasaran segala kebijakan politik. Di Indonesia, kajian tentang etika politik muncul di saat menguatnya keinginan untuk mewujudkan kehidupan politik yang setara, berkeadilan, dan demokratis.

Sedangkan lewat pendekatan struktural ditemukan bahwa etika politik Akbar dapat dicermati lewat tiga dimensi, yakni dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik. Pada dimensi tujuan, gagasan dan praktik politik Akbar berupa visinya tentang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat madani. Pada dimensi sarana, etika politik Akbar berupa strategi membangun Indonesia Sejahtera yang ia usung, serta kemandirian dan rasionalitas partai politik. Membangun Indonesia Sejahtera bagi Akbar diwujudkan lewat strategi sukses pembangunan ekonomi, politik dan hukum, serta sosial dan budaya. Sedangkan pada dimensi aksi, etika politik Akbar mengarah dan diimplementasikan dalam rangka mewujudkan model kepemimpinan tinggi (*high leadership*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan puja segalanya bagi Allah Yang Maha Kuasa. Shalawat beriring salam pada baginda Nabi Muhammad SAW.

Sejak sekian lama penulis menempuh studi di Jurusan Aqidah dan Filsafat, penulis menyadari bahwa waktu bukanlah halangan dan hal serius bagi sebuah pencarian ilmu pengetahuan, karena Allah SWT menuntut *mutaallim* untuk tetap konsisten dan selalu bersabar. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai ilmu-ilmu yang telah dianugerahkan kepada manusia di muka bumi. Akhirnya dengan segala kelemahan dalam penyusunan skripsi ini, Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
3. Bapak Drs. Sudin M.Hum dan Bapak Fahruddin Faiz, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat.
4. Ibu Dr. Fatimah Husein, selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. Sudin M.Hum, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Munawar Ahmad, M.Si., selaku pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Akbar Tanjdung, atas kesediaan meluangkan waktu untuk penulis.
8. Seluruh Staf Pengajar (dosen), Tata Usaha, Satpam dan *Cleaning Service* yang dengan ramah dan sabar melayani penulis selama melangsungkan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kepada ayahanda Petta Nessa, Ibunda Syamsiah, yang selalu memberi inspirasi bagi perjalanan hidup penulis, Abang Ishak beserta istri Ka' Nadira, adik-adikku semua: Sa'diah, M. Aras, Abu Bakar, Syamsul Bahri dan M. Syakur, yang telah banyak memberikan dukungan dan doanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan untuk "adikku" Ria Seksiorini yang selalu mendampingiku, mengingatkanku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun harus mengalami proses yang sangat panjang. Semoga kita dipersatukan dalam bentuk ikatan.
10. Kepada puang Dolla, Puang Iluma, Puang Nia, abang Amir, Ka' Sahe' dan seluruh keluargaku terima kasih atas segala bantuannya.
11. Kepada Bang Iqbal 'Uda', Bang Dian beserta nyonya Lela, Wahyudin Nur beserta nyonya Indah, Pak Swanvri beserta nyonya Dina, Amin beserta nyonya Muri, Zayyin beserta nyonya, Sukri, Hilman, Tamam, Udin Bendum, Didik, dukungan serta bantuan kalian tak ternilai harganya semoga Allah memberikan balasannya, yang tidak terlupakan Mulyadi, Endah, Taufiq, Rico, Ichal, Ono, Sukma, Ahyar, Topan, Kalim, Taufiq oloan, Robby, dll. *Thanks* berat ya...

12. HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar memiliki ‘keluarga’ serta belajar berkarya menjadi insan yang tercerahkan.
13. Kepada Bang Mamad; Areal Manager Aneka Ilmu Kalimantan Selatan dan Pak Ion Areal Manager Aneka Ilmu Yogyakarta. *Matursuwun kula haturkan* atas bantuanya semoga sukses selalu.
14. Seluruh keluarga besar Wisma “Panrannuangku”: Pak Sabri, Daeng Lewa, Ka’ anto, Ucchang, Khadir, Didin, Rido.
15. Teman-teman HMI, PMII, GMKI, PMKRI yang selalu memberikan inspirasi bagi penulis.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, entah berupa materi atau non materi. Semoga kebaikan mereka dibalas dengan kebaikan yang lebih baik daripada yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini tidak hanya menjadi hiasan atau semata-mata syarat dalam menyelesaikan studi, namun lebih dari itu.

Yogyakarta, 24 Oktober 2008
Penulis

A B B A S
0151 0774

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Pernyataan	ii
Pengesahan	iii
Nota Dinas Pembimbing	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan	15
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: BIOGRAFI AKBAR TANDJUNG	17
A. Fase-fase Kehidupan Akbar Tandjung	18
1. Fase Kanak-kanak hingga Menjelang Dewasa	18

2. Fase Aktivitas di Organisasi Pemuda dan Mahasiswa	27
3. Fase Kiprah Politik Nasional	33
B. Aktivitas Kemasyarakatan Akbar Tandjung	41

BAB III: ETIKA POLITIK: KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGANNYA

DI INDONESIA	47
A. Etika Politik: Konsep Dasar dan Perkembangannya	47
B. Pilar-pilar Dasar Etika Politik Kontemporer	54
1. Prinsip-prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer	55
2. Dimensi Etika Politik	60
C. Etika Politik dan Demokratisasi di Indonesia	64

BAB IV: DIMENSI ETIS DALAM GAGASAN DAN PRAKTIK POLITIK

AKBAR TANDJUNG	67
A. Dimensi Tujuan Politik Akbar Tandjung	70
1. Visi Indonesia Sejahtera	70
2. Pemberdayaan Masyarakat Madani	81
B. Dimensi Sarana Politik Akbar Tandjung	87
1. Strategi Membangun Indonesia Sejahtera	87
a. Sukses Pembangunan Ekonomi	87
b. Sukses Pembangunan Politik dan Hukum	93
c. Sukses Pembangunan Sosial dan Budaya	96
2. Kemandirian dan Kritisisme Partai Politik	98
C. Dimensi Aksi Politik Akbar Tandjung: Model <i>High Leadership</i>	104

BAB V: PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	112

Daftar Pustaka

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada sebuah anekdot yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Anekdot tersebut berbunyi sebagai berikut. Apabila seorang anak semasa kecilnya gemar bermain mobil-mobilan, anak tersebut punya bakat untuk menjadi seorang teknisi. Ia sebaiknya disekolahkan di fakultas teknik. Apabila seorang anak suka menggambar atau mencorat-coret tembok, ia punya bakat untuk menjadi pelukis atau seniman. Ia sebaiknya sekolah di fakultas sastra atau di institut seni. Tapi, jika sewaktu kecil seorang anak sudah berani mencuri uang dari saku baju atau dompet ayahnya, maka kelak di masa dewasa ia akan menjadi politisi!

Terlepas dari kebenaran kandungannya, anekdot di atas mengesankan citra negatif wajah perpolitikan di Indonesia dewasa ini. Politik distigmakan sebagai wilayah tempat berkarirnya orang-orang yang semasa kecilnya suka mencuri. Lebih daripada itu, lewat anekdot di atas bisa juga muncul penafsiran bahwa untuk bisa mencuri uang dari saku baju atau dompet ayahnya, si anak mesti mengamati kapan perhatian sang ayah luput dari uang yang tersimpan di dalam saku baju atau dompetnya. Tindakan si anak juga mesti ditopang dengan keberanian, sebab ia mengambil uang itu secara sembunyi-semبunyi. Ia juga akan sangat mudah berbohong jika kelak tindakannya tersebut diketahui oleh sang ayah. Anekdot tersebut menggambarkan wajah politik yang penuh dengan intrik, perilaku kotor dan tidak terpuji, kebohongan, dan bahkan kekerasan.

Kesan negatif yang dapat ditangkap dari anekdot di atas senada dengan pendapat Boni Hargens, salah seorang pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Hargens mengatakan bahwa dewasa ini praktik politik di Indonesia dijalankan tanpa mengindahkan kaidah moral, sehingga kekuasaan berjalan di luar koridor etika.¹ Akibatnya, politik menjadi ranah yang penuh dengan praktik-praktik kotor seperti korupsi, kolusi, nepotisme, janji-janji kosong, hingga tindakan saling sikut dan intimidasi. Kesan ini juga dikuatkan oleh hasil berbagai survei yang menempatkan institusi-institusi politik sebagai salah satu entitas terkorup di negeri ini.

Akan tetapi, kesan negatif terhadap praktik politik di Indonesia yang dijalankan tanpa norma-norma moral atau tanpa mengacu pada prinsip-prinsip etika itu tidak lantas mengandaikan bahwa politik menjadi wilayah yang bisa dihapuskan sama sekali dari kehidupan bermasyarakat di negeri ini. Politik tetap menjadi wilayah yang dibutuhkan dan tidak sepenuhnya bisa ditinggalkan. Sejak zaman Yunani, Aristoteles telah menegaskan bahwa manusia menurut kodratnya merupakan *zōion politikon*,² yakni makhluk yang hidup dalam *polis*.³ Sebagai makhluk hidup, manusia tidak bisa mengelak untuk hidup di dalam *polis-polis*

¹ Boni Hargens, “Mengapa Politik Tidak Etis?”, dalam *Harian Seputar Indonesia*, 1 Maret 2007. www.seputar-indonesia.com/edisi-cetak/opini-sore/mengapa-politik-tidak-etis

² Dalam terminologi modern, manusia sebagai *zōion politikon* sering juga diartikan “manusia sebagai makhluk sosial”. Lihat: Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles* (Yogyakarta: Kanisius, 1975), hlm. 166.

³ Kata *polis* merupakan asal-usul untuk kata-kata dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Inggris seperti *polity*, *politic*, *politics*, *political*, *police*, dan *policy*. Juga kata-kata dalam bahasa Indonesia, seperti *politik*, *politikus*, *polisi*, dan sebagainya. *Polis* artinya negara kecil atau negara-kota dan sekaligus rakyat yang hidup dalam negara-kota tersebut. *Polis* muncul sebagai suatu bentuk kemasyarakatan di Yunani antara abad ke-8 dan ke-7 S.M. Lihat: Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), hlm. 6.

tertentu. Di dalam *polis-polis* inilah relasi-relasi sosial dan politik berlangsung di antara mereka. Kees Bertens mengatakan bahwa selain bisa dilihat sebagai latar belakang lahirnya filsafat, secara sosial dan politik, *polis* juga bisa dinilai sebagai lembaga politik yang ditandai dengan ciri-ciri otonomi, swasembada, dan kemerdekaan.⁴

Jadi bisa dikatakan bahwa politik merupakan keniscayaan yang tak terelakkan bagi manusia yang hidup sebagai makhluk sosial. Ketika seseorang berhadapan dengan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu kelompok atau asosiasi, saat itu pula ia berhadapan dengan politik. Pada saat yang sama ia bisa menemukan hubungan-hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama itu, seperti aturan, kewenangan, atau kekuasaan.⁵

Jika di satu sisi politik dianggap penting guna menopang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sementara di sisi lain ia dinilai negatif karena penuh dengan praktik-praktik kotor dan amoral, maka persoalan yang mendesak untuk dicarikan solusinya adalah bagaimana merubah praktik-praktik politik yang kotor dan amoral itu menjadi bermoral dan rasional. Dengan kata lain, perubahan yang perlu diupayakan adalah perubahan menuju tatanan politik yang berkeadaban,⁶ sehingga politik bisa menopang kehidupan bermasyarakat, khususnya di negara Indonesia ini.

⁴ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat...* hlm. 20-21.

⁵ Stephen K. Bailey, *American Politics and Goverment* (Washington DC: Voice of America Forum Lectures, 1973), hlm. 6.

⁶ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 26.

Menurut Haryatmoko, upaya untuk mewujudkan tatanan politik yang rasional, bermoral, dan berkeadaban mesti dimulai dengan menempatkan dimensi moral dan etika sebagai dasar rasionalitas kegiatan politik. Dalam hal ini, politik yang bermoral dan berkeadaban mencerminkan kedewasaan etika politik para pelakunya. Etika politik menjadi penting pada langkah pertama, karena pada dasarnya dunia perpolitikan bukanlah dunia yang kotor, melainkan dunia yang luhur. Politik disebut dunia yang luhur karena subyek yang mengurus dan obyek yang diurus di dalamnya adalah manusia. Oleh sebab itu, norma-norma moral dan prinsip-prinsip etika hendaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan perpolitikan itu sendiri.⁷

Di Indonesia, kebutuhan akan dimensi moral dan etika sebagai dasar rasionalitas praktik politik mencuat ke permukaan dan menjadi wacana publik menjelang terselenggaranya Pemilihan Umum tahun 2004. Pada waktu itu, masyarakat yang sudah gerah dengan perilaku politik kotor yang dipraktikkan oleh para politisi di negeri ini menyebut mereka sebagai “politisi busuk”.⁸ Terlepas dari penilaian bahwa istilah “politisi busuk” yang berkonotasi negatif itu hanyalah bagian dari kampanye politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan lawan politiknya, istilah tersebut mencerminkan kerinduan masyarakat terhadap tatanan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika.

⁷ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 23-24.

⁸ “Perubahan Terjadi Pasca-2014: Muncul Generasi Lebih Peduli HAM”, dalam *Kompas*, 28 November 2007, hlm. 2.

Pada titik inilah perbincangan mengenai etika politik menjadi penting di Indonesia. Menurut Haryatmoko, betapa pun kerasnya pertarungan yang terjadi di wilayah politik sehingga praktik politik cenderung amoral dan menghalalkan segala cara, masyarakat masih merindukan terwujudnya keteraturan dan kedamaian. Untuk mewujudkan hal itu, etika politik menjadi pembernanar normatif bagi praktik politik yang dijalankan oleh para politisi. Semakin besar pembernanar normatif yang diperoleh oleh seorang politisi dari masyarakat, semakin kuat ia mendapatkan legitimasi bagi aktivitas politiknya.

Perbincangan tentang pengarus-utamaan etika dan moralitas dalam aktivitas politik senantiasa relevan dan bahkan krusial untuk dilakukan secara konsisten. Terlebih lagi jika perbincangan tentang hal itu justru dicuatkan oleh mereka yang sehari-hari bergelut dalam aktivitas politik yang telanjur mendapat stigma kotor. Meskipun sebagian orang memiliki pandangan sinis bahwa berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun atau menilai perbincangan tentang etika politik sebagai nonsens,⁹ akan tetapi upaya untuk menjadikan dimensi moral dan etika sebagai dasar rasionalitas aktivitas politik, sama sekali tidak boleh berhenti.

Di tengah upaya pengarus-utamaan etika dan moralitas dalam aktivitas politik semacam itu, Akbar Tandjung menjadi sosok politikus yang penting untuk dicermati. Tokoh ini menjadi penting karena ia sering disebut-sebut sebagai seorang politikus yang punya integritas moral, santun, berakhhlak mulia dan

⁹ Haryatmoko, "Etika Politik, Bukan Hanya Moralitas Politikus", http://tumasouw.tripod.com/artikel/etika_politik_bukan_hanya_moralitas.htm

sekaligus sangat akseptabel dan lincah dalam berpolitik.¹⁰ Akbar bukan hanya menempatkan dirinya sebagai seorang politikus Indonesia yang piaawai, tetapi juga mendasarkan praktik dan kegiatan politiknya di atas landasan-landasan moral dan prinsip-prinsip etika yang rasional dan teruji.

Untuk menunjukkan pentingnya dimensi moral dan etika dalam aktivitas politik, Akbar mengatakan bahwa aktivitas dan praktik politik harus tetap dijaga agar berjalan seiring dengan rambu-rambu norma dan etika. Sebaliknya, praktik politik yang tidak etis dan tidak berkeadaban harus dihindari. Ia menegaskan:

Dengan etika politik yang kuat maka kompetisi politik akan berlangsung secara sehat, demokratis, *fair*, dan konstitusional berdasarkan *rule of the game* yang disepakati bersama. Kompetisi politik haruslah berdasarkan etika dan berlangsung secara damai, demokratis, *fair*, beradab, dan konstitusional. Di luar cara-cara itu harus dihindari karena bukan hanya tidak etis, melainkan juga tidak beradab (*uncivilized*), tidak *fair*, tidak konstitusional, dan tidak sesuai dengan *rule of the game*.¹¹

B. Rumusan Masalah

Penelitian apa pun, harus menegaskan lingkup permasalahan yang menjadi subyek penelitian atau persoalan yang hendak diteliti. Selain hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi ruang lingkup penelitian tersebut, ia juga ditujukan untuk memberikan batasan-batasan yang tegas terhadapnya. Terkait dengan itu, sasaran utama dari subyek itu harus diterangkan pula, demi tercapainya penelitian yang terfokus dan mendalam. Dalam metodologi penelitian, subyek dan sasaran penelitian ini biasa disebut sebagai obyek formal dan obyek material.¹²

¹⁰ M. Deden Ridwan & M. Muadjirin, *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. vii.

¹¹ Akbar Tandjung, “Memperkokoh Etika dan Solidaritas Bangsa Memperkuat Kedaulatan Rakyat Menuju Masyarakat Madani”, *Naskah Ceramah*, disampaikan pada acara Pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam [PB HMI], 16 Januari 2000, hlm. 3.

¹² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 33-34.

Subyek penyelidikan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang etika politik. Sebagaimana dimaklumi, kajian terhadap etika merupakan salah satu bidang yang ditekuni dalam penelitian filsafat. Kajian tentang etika politik berkenaan dengan perihal mempelajari bagaimana praktik-praktik politik diimplementasikan secara etis dan sesuai dengan kaidah-kaidah etika yang berlaku dalam kehidupan sosial. Adapun ruang lingkup permasalahan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah tentang penjelasan dan pemahaman terhadap dimensi-dimensi etika dan moralitas politik sebagaimana ditemukan dalam pandangan dan praktik politik Akbar Tandjung, serta korelasinya dengan perkembangan wacana etika politik di Indonesia.

Untuk membatasi dan menegaskan masalah penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan penelitian (*research question*) berikut ini:

1. Apakah yang dimaksud dengan etika politik dan bagaimanakah perkembangan wacana tentang etika politik di Indonesia?
2. Bagaimanakah etika politik diwacanakan dan dipraktekkan dalam aktivitas politik Akbar Tandjung di kancah perpolitikan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa mencapai beberapa tujuan berikut, yaitu:

1. Untuk memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar etika politik, serta perkembangan wacana etika politik di Indonesia.
2. Untuk menelusuri dan mendeskripsikan dimensi-dimensi etis dalam pandangan dan praktik politik Akbar Tandjung.

Di samping itu, penelitian ini juga memiliki kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan bisa memenuhi beberapa hal berikut, yaitu:

1. Sebagai kontribusi wacana, khususnya bagi penelitian-penelitian sejenis dan umumnya bagi perkembangan khazanah pemikiran dan keilmuan Islam kontemporer, terutama yang berkenaan dengan tema etika politik.
2. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi persyaratan kelulusan jenjang strata satu sebagai Sarjana Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang etika dan moralitas, terutama dalam kaitannya dengan ranah politik sudah banyak dilakukan. Di antara berbagai kajian itu ada yang dilakukan langsung oleh para ahli yang memiliki kompetensi khusus di bidang ini, dan ada pula yang dilakukan oleh mereka yang hendak memahaminya secara lebih mendalam. Hingga saat ini, berbagai literatur yang mengetengahkan pembahasan mengenai persoalan etika dan moralitas politik cenderung mudah diperoleh. Literatur-literatur tersebut tidak hanya dihasilkan lewat satu perspektif tertentu saja, tetapi lewat berbagai perspektif yang beragam.

Adapun literatur yang secara khusus membahas tentang tokoh politik yang bernama Akbar Tandjung masih sangat sedikit ditemukan. Beberapa penelitian yang telah ditulis mengenai tokoh ini dalam lingkup tema yang beragam dapat disebutkan berikut ini.

Karya yang ditulis oleh Evendhy M. Siregar yang berjudul *Akbar Tandjung Anak Desa Sorkam*, yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh Pustaka Mari Belajar mengetengahkan kajian tentang biografi politik Akbar Tandjung. Karya ini hendak memperkenalkan sosok politikus kawakan tersebut kepada para pembacanya secara lebih akrab. Sebagaimana lazimnya sebuah biografi, yang ditonjolkan dalam karya Evendhy ini adalah keunikan tokoh yang bernama Akbar Tandjung ini di tengah konstalasi perpolitikan di Indonesia. Evendhy juga mencoba mencari kesinambungan historis antara kultur Akbar semasa kecil hingga ia bergelut di ranah politik dengan kecenderungannya yang pluralis, akomodatif, dan mudah berkompromi. Sebagai sebuah karya biografi, buku yang ditulis oleh Evendhy ini tidak menyentuh wilayah etika politik tokoh ini.

Karya lain yang juga memuat biografi politik Akbar Tandjung adalah karya yang ditulis oleh Anwari WMK. Karya tersebut berjudul *Bukan Sekadar Kata: Perjalanan Politik Akbar Tandjung. Bukan Sekadar Kata* diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tahun 2005. Melalui karya itu, Anwari berupa menyingkap *weltanschauung* (pandangan dunia) Akbar Tandjung mengenai perpolitikan di Indonesia. Anwari berasumsi bahwa pandangan dunia yang dimiliki oleh pribadi Akbar itulah yang kemudian mengejawantah dalam bentuk rangkaian aktivitas dan praktik politiknya, dari dulu hingga sekarang.

Karya Anwari ini ditujukan juga untuk menunjukkan secara akademis seberapa jauh aspek personalitas Akbar Tandjung memiliki relasi dengan aktivitas politiknya. Untuk itu, Anwari memaparkan data-data baru mengenai tokoh

tersebut yang selama ini belum diketahui oleh publik. Anwari mendapatkan data-data tersebut secara langsung dari paparan tokoh yang dikajinya.

Pemaparan data-data baru tersebut merupakan keunggulan karya Anwari. Lewat data-data tersebut Anwari mengharapkan munculnya penafsiran dan cara pandang baru terhadap peran politik Akbar Tandjung dan terjadinya proses pewarisan pengetahuan dan pengalaman politik dari Akbar Tandjung kepada masyarakat politik dan generasi baru kepemimpinan politik di Indonesia.

Meskipun karya Anwari telah berhasil mengungkap hal-hal yang baru dari biografi politik Akbar Tandjung, akan tetapi karya tersebut tidak menyinggung berbagai dimensi di luar politik dan dimensi-dimensi lain yang terjalin dengannya, seperti dimensi etika politik. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Anwari bahwa karya yang ditulisnya itu sedikit sekali menyinggung dimensi-dimensi lain di luar politik pada rentang 60 tahun kehidupan Akbar Tandjung.

Ahmaddani G-Martha telah menulis karya editorial tentang Akbar Tandjung yang diberi judul *Akbar Tandjung Menghadang Badai*. Karya ini diterbitkan tahun 2003 oleh Brajedni Communications. Karya ini merupakan bagian dari seri penerbitan *Komunikasi Politik* yang diterbitkan oleh penerbit yang bersangkutan, khususnya berkenaan dengan tema peristiwa-peristiwa politik (*political events*) sejak masa reformasi bergulir di Indonesia tahun 1998 silam. Persoalan utama yang ditulis Ahmaddani dalam karyanya ini adalah tentang kasus korupsi di tubuh Bulog (Badan Urusan Logistik) yang sempat menyeret Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar ke meja hijau.

Ahmaddani menggunakan informasi-informasi yang berserakan di berbagai media massa di ibukota sebagai bahan bagi karyanya tersebut. Informasi-informasi tersebut ia analisis dengan menggunakan perangkat analisis isi (*content analysis*). Tujuan Ahmaddani menulis karya tersebut adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lengkap mengenai kasus yang menimpa Akbar Tandjung yang sempat mencoreng nama baik tokoh ini. Gambaran dan pemahaman inilah yang kemudian ia tuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dan selanjutnya disebarluaskan kepada para kader dan aktifis partai Golkar. Secara politis, karya ini menjadi penting mengingat simpang-siurnya pemberitaan media terhadap kasus yang menimpa Akbar Tandjung waktu itu. Sedangkan secara ilmiah, signifikansi karya ini terletak pada kekayaan data yang diperoleh dan kepiawaian penulis ketika menggunakan *content analysis* untuk memahami berbagai informasi yang ia peroleh dari berbagai media mengenai kasus yang menimpa Akbar.

Karya yang dalam porsi tertentu telah mengulas tentang etika politik Akbar Tandjung ditulis oleh M. Deden Ridwan dan M. Muadjirin. Karya tersebut berjudul *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung*. Lewat karya yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan pada tahun 2003 ini, penulisnya berusaha mengkaji pemikiran dan praktik politik Akbar Tandjung. Penulis melihat sosok Akbar sebagai politisi yang unik. Keunikan tersebut tampak ketika Akbar lebih memilih melakukan pembaharuan politik di tingkat praksis politik, dan bukan di level pemikiran politik. Penulis meyakini bahwa pembaharuan di tingkat praktik politik ini merupakan wilayah yang harus

menjadi salah satu bahan pertimbangan dan perenungan dalam rangka menyelesaikan pelbagai persoalan bangsa.

Selain melihat keunikan sosok Akbar, lewat karyanya itu Ridwan dan Muhadjirin juga memposisikan Akbar Tandjung sebagai sosok yang menjembatani kecenderungan nasionalisme dan agamis di level politik praktis. Dalam hal ini, Akbar dinilai sebagai individu yang merujuk pada dua variabel; *pertama*, Islam sebagai pandangan hidup dan kenyataan sosial-budaya; dan kedua Golkar sebagai partai politik terbuka, sekular, plural, dan nasionalis. Penulis karya tersebut menemukan bahwa basis sosial dan lingkungan politik Akbar tidak bisa dipisahkan dari Islam, terutama Islam modernis yang disimbolkan oleh HMI. Akbar adalah figur penting yang berusaha melakukan pembaharuan politik Islam secara praktis dengan cara memasuki Golkar dan birokrasi. Perkembangan praktik politik Akbar membawa dirinya mampu melampaui basis politik konvensionalnya, yakni Islam.

Meskipun Ridwan dan Muhadjirin telah meluangkan porsi tertentu guna membahas dimensi etika politik Akbar Tandjung, akan tetapi dimensi ini tidak menjadi fokus perhatian utama. Oleh karena itu, karya ini lebih banyak memaparkan retorika dan langkah-langkah Akbar dalam berpolitik, serta mensosialisasikan visi, gagasan, pemikiran, dan praktik politik Akbar Tandjung ketimbang melakukan telaah kritis-akademis dengan titik perhatian pada dimensi etika politik tokoh tersebut.

Penelusuran yang telah penulis lakukan atas karya-karya yang membahas beberapa tema seputar tokoh yang bernama Akbar Tandjung ini menunjukkan

bahwa sebagian besar karya yang telah diterbitkan sebelumnya hanya membahas aspek tertentu dari tokoh tersebut. Karya-karya tersebut selain belum mengetengahkan pembahasan tentang etika politik Akbar Tandjung, juga belum mendalami lebih jauh bagaimana etika tersebut bersenyawa dengan praktik politik Akbar Tandjung di pentas perpolitikan Indonesia. Barangkali tema ini luput dari perhatian para peneliti karena etika politik biasanya dinilai sebagai wilayah normatif yang seringkali kontradiktif dan tidak seiring dengan praktik politik di tingkat praktis.

Berdasarkan hasil studi pustaka di atas, penulis belum menemukan karya tulis, baik buku ataupun artikel yang mengkaji tema etika politik Akbar Tandjung. Tema yang yang luput dari perhatian para peneliti inilah yang hendak penulis telusuri dan pahami lewat penelitian ini. Berdasarkan hasil studi pustaka di atas pula penulis beranggapan bahwa penelitian yang penulis lakukan mengenai topik ini akan bisa dipertanggung-jawabkan orisinalitas dan kontribusi akademisnya nantinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).¹³ Artinya penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan telaah terhadap karya-karya ilmiah, baik yang tertuang dalam buku, majalah, jurnal, makalah, serta berbagai media yang mengulas tema penelitian ini. Secara garis besar, penelitian

¹³ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penulisan Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 63.

dalam kategori *library research* ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu; *pertama*, tahap pengumpulan data; dan *kedua*, tahap pengolahan dan analisis data dengan metode analisa yang tertentu.

a. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi terhadap data primer dan data sekunder. Data primer berupa bahan kepustakaan yang mengulas tema etika politik Akbar Tandjung yang tertuang di beberapa karya, tulisan, dan pidato politik tokoh ini. Mengingat data-data tertulis semacam itu hanya tersedia dalam jumlah sedikit, maka data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan tokoh yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan data primer, terutama berkenaan dengan instrumen dan alat baca metodologis dan teoritis yang digunakan dalam mengulas tema etika politik.¹⁴

b. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan itu selanjutnya diidentifikasi berdasarkan topik-topik pembahasan. Data-data yang berkenaan dengan etika dan praktik politik Akbar Tandjung dipisahkan dari data-data yang memuat visi, gagasan, dan pemikiran politik Akbar. Adapun metode analisis data digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pernyataan-pernyataan yang

¹⁴ Winarno Surachmad, *Pengantar Penulisan Filsafat: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1987), hlm. 132.

berhubungan dengan subyek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti atau makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut.¹⁵

2 Pendekatan

Data yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan itu selanjutnya dideskripsikan, dieksplorasi, dan dianalisis secara historis dan struktural. Pendekatan historis digunakan untuk menganalisa data-data yang berkenaan dengan biografi Akbar Tandjung. Sedangkan pendekatan struktural digunakan untuk menganalisis data-data yang berkenaan dengan tema etika politik Akbar Tandjung.

Pendekatan struktural yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengacu kepada penjelasan Haryatmoko bahwa struktur etika politik terdiri dari dimensi-dimensi etis yang saling terkait satu sama lain. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan secara struktural, baik antar berbagai elemennya maupun dengan kondisi praksis-historis yang melingkupinya. Etika politik tidak hanya masalah perilaku seorang politikus. Etika politik juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari proses analisis data dalam penelitian ini sajikan dalam bab-bab yang terpisah, untuk memudahkan pemahaman terhadap persoalan yang hendak dijawab. Tentu saja, pemilihan pada bab-bab tersebut dilakukan dengan tetap menjaga konsistensi dan keutuhannya.

¹⁵ Sudarto, *Metodologi Penulisan Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 60.

Bab pertama memuat pendahuluan, yang terdiri dari paparan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan biografi Akbar Tandjung. Fokus pemaparan biografi tokoh ini adalah pada aspek riwayat hidup yang penulis pilah ke dalam fase-fase kehidupan Akbar. Fase-fase ini didasarkan atas perkembangan aktivitas politik yang digeluti tokoh ini. Penulis berusaha melakukan penelusuran melalui beberapa fase untuk menunjukkan peralihan-peralihan yang dialami Akbar sampai ia dinilai oleh banyak kalangan sebagai seorang politikus yang handal dan menjunjung tinggi etika politik. Bab kedua ini ditutup dengan uraian tentang aktivitas kemasyarakatan Akbar di luar aktivitas politiknya.

Bab ketiga menguraikan tentang wacana etika politik secara teoritis dan perkembangannya di Indonesia. Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang konsep-konsep dasar etika politik, pilar-pilar dasar etika politik kontemporer, dimensi-dimensi etika politik, dan bagaimana wacana tentang etika politik beresonansi dengan perkembangan proses demokrasi di Indonesia dewasa ini.

Bab keempat memuat uraian tentang etika dan praktik politik Akbar Tandjung. Uraian tersebut dipaparkan lewat tiga dimensi etika politik yang telah diterangkan pada bab sebelumnya. Masing-masing dimensi diderivasikan menjadi beberapa item persoalan, guna bisa menjelaskan etika dan praktik politik Akbar.

Bab kelima merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran akademis demi pengkayaan bagi penelitian sejenis pada masa-masa mendatang.

BAB II

BIOGRAFI AKBAR TANDJUNG

Akbar Tandjung adalah salah seorang tokoh politik nasional kontemporer di Indonesia. Ia dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang pernah menduduki berbagai posisi penting di organisasi pemuda, mahasiswa, partai politik dan pemerintahan. Sebagai aktor politik, Akbar telah mengabdikan lebih dari separuh masa hidupnya untuk berkiprah di ranah politik Indonesia. Selain itu, Akbar juga disebut-sebut sebagai tokoh politik kondang di masa reformasi yang dalam beberapa hal punya kedekatan tertentu dengan Orde Baru.

Nama Akbar acapkali menjadi berita utama di berbagai media massa lokal dan nasional, baik surat kabar, majalah, jurnal, maupun televisi. Kiprah tokoh ini di pentas politik dan pemerintahan Indonesia tidak jarang pula mendapat sorotan internasional. Semua itu menegaskan ketokohnya yang tidak diragukan lagi, terutama di kancah perpolitikan Indonesia.

Salah satu hal yang menarik dari pribadi Akbar sebagai seorang tokoh politik adalah adanya kesan-kesan moralis yang diutarakan oleh beberapa kalangan tentang dirinya. Akbar dinilai sebagai seorang politikus yang rendah hati, tidak emosional, dan jarang melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang akan memanaskan situasi perpolitikan nasional. Ia juga dianggap sebagai seorang politikus yang santun, bertanggung-jawab, berakhhlak

tinggi, dan punya integritas moral. Singkatnya, Akbar dipandang sebagai seorang politikus yang berkeadaban dan punya integritas moral.¹

Untuk mengenal lebih dekat sosok Akbar Tandjung yang disebut-sebut sebagai politikus moralis ini, berikut ini penulis akan memaparkan biografi tokoh tersebut berdasarkan data-data yang berhasil penulis rangkum dari berbagai sumber.

A. Fase-fase Kehidupan Akbar Tandjung

Harus segera ditegaskan di sini bahwa dasar penyusunan fase-fase kehidupan tokoh yang bernama Akbar Tandjung ini tidak berdasarkan atas kaidah psikologis, sebagaimana disarankan dalam kajian psikologi kontemporer, melainkan didasarkan pada hasil penjelajahan pustaka, baik yang berupa otobiografi maupun biografi yang berhubungan langsung dengan riwayat hidup Akbar Tandjung. Oleh karena itu, titik perhatian dalam penyusunan fase-fase ini adalah pada pengalaman dan kesadaran yang menandai masing-masing fase dalam rentang kehidupan Akbar Tandjung, dan bukan pada proses perkembangan psikologisnya.

1. Fase Kanak-kanak hingga Menjelang Dewasa

Akbar Tandjung lahir di Sorkam pada tanggal 14 Agustus 1945. Menurut Evendhy M. Siregar, tidak banyak yang tahu bahwa sesungguhnya Akbar lahir di Sorkam. Di dalam biodata Akbar Tandjung selalu disebutkan bahwa ia lahir di

¹ Nurcholish Madjid, “Sekapur Sirih”, dalam M. Deden Ridwan & M. Muhamadirin, *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. xxi-xxii.

Sibolga, dan bukan di Sorkam.² Evendhy beralasan bahwa Sibolga disebut sebagai tanah kelahiran Akbar karena daerah ini jauh lebih ramai dan lebih dikenal orang ketimbang desa Sorkam. Di tempat lain, Anwari WMK menegaskan bahwa selain Akbar Tandjung, banyak juga orang-orang yang lahir di Sorkam, tapi menyebut kota Sibolga sebagai tempat kelahirannya dengan alasan yang sama.³

Desa Sorkam berjarak sekitar 30 km dari kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Desa ini merupakan wilayah pesisir Tapian Nauli yang menjadi penghubung jalan darat dari kota Barus ke Sibolga. Wilayah desa Sorkam dibelah oleh sebuah sungai yang bernama Aek Sibundong. Sungai ini memisahkan desa Sorkam kanan dan desa Sorkam kiri. Akbar Tandjung dilahirkan dan menghabiskan masa kanak-kanaknya di desa Sorkam kanan. Bagi Akbar kecil, mandi-mandi di Aek Sibundong merupakan peristiwa sehari-hari yang sangat menyenangkan.⁴

Akbar Tandjung adalah anak ke-13 dari 16 bersaudara. Ayahnya bernama Zahiruddin Tandjung, sedangkan ibunya bernama Siti Kasmijah. Zahiruddin adalah salah seorang pengurus Muhammadiyah di Sorkam dan sehari-harinya bekerja sebagai pedagang kain, getah dan rempah-rempah yang cukup terkenal di Tapanuli Tengah. Enam belas orang anak dari pasangan suami istri ini terdiri dari

² Evendhy M. Siregar, *Akbar Tandjung Anak Desa Sorkam* (Jakarta: Pustaka Mari Belajar, 2000), hlm. 5.

³ Anwari WMK, *Bukan Sekadar Kata: Perjalanan Politik Akbar Tandjung* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hlm. 19.

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

delapan orang laki-laki dan delapan orang perempuan. Empat orang di antaranya meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa.⁵

Nama lengkap Akbar adalah Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung. Biasanya hanya keluarga dan kenalan dekat saja yang mengetahui nama lengkap tersebut. Nama itu diberikan ayahnya sebagai realisasi dari *khaul* (janji) saatistrinya hamil tua. Menjelang kelahiran Akbar, sang ayah mendengar kabar penting dari radio tentang undangan dari komando tentara Jepang di Asia Tenggara yang berpusat di Rangoon, Myanmar kepada dua tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno dan Mohammad Hatta, untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari.⁶

Berita radio itu menarik perhatian sang ayah, yang lantas mencetuskan janji. Jika dalam waktu dekat Indonesia benar-benar merdeka dari kekuasaan tentara Jepang dan ia dikaruniai anak laki-laki, maka anak tersebut akan diberi nama “Djandji Akbar”, yang berarti “janji besar”. Ternyata tiga hari setelah kelahiran anak laki-lakinya itu, kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) benar-benar terwujud. Maka, jadilah anak laki-laki yang baru lahir itu diberi nama lengkap Djandji Akbar Zahiruddin Tandjung,⁷ yang kemudian lebih dikenal sebagai Akbar Tandjung.

Akbar kecil telah menjadi yatim sejak ia berusia tujuh tahun. Ayahnya wafat pada tahun 1952. Setelah sang ayah wafat, kehidupan sehari-hari Akbar kecil dan saudara-saudaranya bergantung kepada ibu dan putera tertua, Dato

⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶ Evendhy M. Siregar, *Akbar Tandjung...*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*.

Usman, yang menjadi penerus toko kain, getah dan rempah-rempah warisan ayahnya di Sibolga.⁸ Kondisi perekonomian keluarga pada waktu itu cukup memprihatinkan, apalagi keluarga tersebut tergolong keluarga besar. Seiring beranjaknya waktu, saudara-saudara Akbar yang telah beranjak dewasa mulai mempunyai penghasilan sehingga dapat meringankan beban kebutuhan hidup mereka.

Akbar kecil menghabiskan masa kanak-kanaknya di Sorkam hingga ia duduk di kelas tiga Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah. Semasa menempuh pendidikan awal ini, Akbar diasuh oleh tantenya dari pihak ibu dan hidup terpisah dari kedua orang tuanya yang menetap dan membuka usaha di Sibolga. Tentang arti pentingnya masa kanak-kanak Akbar di Sorkam ini, Anwari WMK menyimpulkan:

... di Sorkam itulah *culture and personality* Akbar Tandjung mulai menemukan fase awal pembentukannya ... yang sedikit banyaknya menjadi landasan untuk memasuki lingkungan-lingkungan budaya lain secara lebih luas kelak di kemudian hari, termasuk lingkungan politik dalam konteks *nation wide* ... Seperti halnya orang lain di tempat lain yang eksistensinya bertautan dengan lingkungan budaya pada fase awal kehidupan, begitu pun dengan Desa Sorkam terhadap eksistensi Akbar Tandjung.⁹

Kepindahan keluarga Zahiruddin Tandjung dari Sorkam ke Sibolga di saat Akbar kecil masih menduduki bangku Sekolah Rakyat itu terkait erat dengan upaya memperbaiki taraf perekonomian keluarga. Di Sibolga, kedua orang tua Akbar membuka sebuah toko bernama “Marison”, tepatnya di Jl. Thamrin No. 67. Telah disebutkan di atas bahwa sementara keluarganya membuka usaha di Sibolga, Akbar kecil tinggal bersama tantenya di Sorkam. Di masa itulah Akbar

⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

⁹ Anwari WMK, *Bukan Sekadar Kata...*, hlm. 26.

kecil mulai mengenal ruang baru dalam fase kehidupan kanak-kanaknya, yakni cerita masa kecil Akbar menelusuri jalanan antara Sorkam dan Sibolga yang menorehkan kenangan tersendiri di dalam dirinya. Jika Sorkam membentuk atmosfer masa kelahiran dan awal masa kanak-kanak Akbar, maka jalan darat Sorkam-Sibolga merupakan perluasan pandangan dunia di masa kanak-kanak, di mana ia mulai menyematkan sebentuk cita-cita hidupnya kelak di hari depan. Tentang hal ini, Anwari WMK mengutip ungkapan Akbar sendiri:

Jalan Sorkam-Sibolga rusak berat dan berlumpur. Seringkali mobil berhenti atau mogok dan terpaksa harus didorong. Sehingga diperlukan waktu berjam-jam untuk tiba di Sibolga dari Sorkam. Meskipun begitu, pada hari libur saya sering ke Sibolga. Karena Sibolga di tepi pantai, banyak kapal dan para pelaut datang ke situ. Saya sering mandi-mandi di pantai Sibolga. Saya sering menyelam karena kapal-kapal itu membuang botol-botol minuman yang masih ada isinya. Itu pengalaman menarik tersendiri buat saya. Pertemuan saya dengan pelaut-pelaut itu menginspirasi saya untuk masuk ke Angkatan Laut. Menjadi tentara di Angkatan Laut adalah cita-cita saya di masa kecil.¹⁰

Evendhy M. Siregar mencatat bahwa Akbar kecil ketika ditanyai tentang cita-citanya jika sudah besar nanti, selalu menjawab: “Cita-cita saya jadi tentara angkatan laut”.¹¹ Kutipan di atas memperlihatkan arti penting Sibolga bagi Akbar kecil dalam menyematkan cita-citanya tersebut. Cita-cita ini muncul karena tidak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Sibolga, Akbar sering melihat para anggota TNI Angkatan Laut berlatih di Samudera Indonesia dan Pantai Sibolga. Di kota yang sama Akbar kecil menikmati laut dan merasakan indahnya masa kecil bermain-main di laut. Di sana pula ia terpesona melihat kehebatan awak kapal laut yang ia pahami memiliki tubuh kekar berotot. Akbar kecil

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

¹¹ *Ibid.*.

mendambakan kenyataan semacam itu dapat ia alami di masa depan. Atas dasar itulah ia lalu bercita-cita menjadi angkatan laut.

Setelah sang ayah meninggal dunia, usaha kain, getah dan rempah-rempah yang telah dirintisnya di Sibolga diteruskan oleh Dato Usman, saudara tertua Akbar. Atas inisiatif Dato Usman, usaha tersebut kemudian dipindahkan ke Medan hingga akhirnya secara perlahan tapi pasti NV Marison berkembang sebagai sebuah perusahaan dengan skala ekonomi yang makin besar. Bersamaan dengan itu, Akbar kecil pindah ke Medan dan melanjutkan pendidikan dasarnya di SR Nasrani, Jl. Seram.¹² Selama di Medan, Akbar kecil bersekolah di pagi hari di lembaga pendidikan Nasrani, dan siang hingga sore hari ia menempuh pendidikan di sebuah Madrasah. Tentang kepindahan dan pendidikannya di Medan, Akbar mengisahkan:

Saya pindah ke Medan tahun 1955, kakak-kakak saya mengatakan bahwa semua usaha dipindahkan ke Medan ... Pengetahuan agama Islam saya peroleh di Madrasah, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Dan di sekolah Nasrani, saya mengikuti kegiatan keagamaan, termasuk ikut menyanyikan lagu-lagu Natal. Itulah sebabnya saya sejak kecil telah memiliki pengalaman dalam lingkungan yang lebih majemuk.¹³

Di Medan, usaha keluarga yang dikelola oleh Dato Usman, saudara tertua Akbar, berkembang pesat. Dato Usman bahkan akhirnya pindah ke Jakarta untuk berkonsentrasi mengembangkan perusahaan Marison. Atas permintaannya pula Akbar yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Rakyat di Medan kemudian pindah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di SMP Perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Kepindahan Akbar kali ini bersama dengan ibu dan adik-adiknya.

¹² *Ibid.*, hlm. 45.

¹³ *Ibid.*, hlm. 40 dan 46.

Di Jakarta, Akbar melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Sebelum pindah ke Jakarta, ia sebenarnya sudah menempuh pendidikan SMP selama satu tahun di Medan. Oleh karena itu, ketika melanjutkan ke SMP Perguruan Cikini, ia diterima di kelas dua. Tidak banyak yang bisa dicatat dari perjalanan hidup Akbar selama dua tahun menempuh pendidikan di SMP tersebut, kecuali prestasinya yang cukup menonjol di beberapa mata pelajaran.

Setelah lulus dari SMP Perguruan Cikini, Akbar melanjutkan pendidikannya di SMA Kanisius, Jakarta Pusat. Tentang suasana pendidikannya di SMA Kanisius ini, Akbar mengisahkan:

Saya bersekolah di SMA Kanisius Jakarta dan lulus tahun 1964. Suasananya Katolik, perayaan keagamaan saya ikuti. Bahkan saya terpilih menjadi Ketua Kelas, yang mana berarti saya harus aktif menggerakkan berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan. Saya tentu tidak ikut kegiatan ritual keagamaan Katolik, tapi suasana kegiatan keagamaan itu sangat terasa. Ini karena setiap pagi kita membaca doa yang dipimpin oleh seorang pastor.¹⁴

Sebagaimana diungkapkan oleh Akbar, pendidikan yang ia jalani selama di SMA Kanisius berlangsung sangat ketat. Pulang dari sekolah, ia harus kembali membaca buku-buku pelajaran dan menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah hingga malam hari. Untuk keperluan itu, Akbar seringkali harus datang ke rumah kawan-kawannya untuk bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya itu. Akbar mengenang ketatnya proses pendidikan di SMA Kanisius tersebut:

Memang kualitas pendidikannya baik, dan secara umum alumninya mendapatkan nilai baik. Pada waktu mengikuti ujian negara atau masuk ke universitas negeri, kami tidak mengalami kesulitan menyelesaikan soal-soal. Disiplinnya juga sangat tinggi. Walaupun ketua kelas, saya pernah mendapat hukuman. Karena datang terlambat, saya mendapati pintu pagar telah ditutup. Lalu saya dihukum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

menulis beberapa halaman dalam buku catatan, yaitu menyalin cerita dari sebuah buku.¹⁵

Seiring dengan masa pendidikan Akbar di SMA Kanisius, cita-cita masa kecilnya untuk bisa mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Laut menjadi pupus, sebab dalam perkembangannya ternyata Akbar harus menggunakan kacamata minus. Sejak saat itu, ia harus menghapus impiannya untuk bisa berkesempatan melanglang buana sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Namun demikian, kegagalan impian Akbar ini seolah-olah merupakan peluang baginya untuk menggeluti arena lain di dalam kancah perpolitikan nasional Indonesia.

Dari deskripsi tentang masa kanak-kanak hingga menjelang dewasa dari fase kehidupan Akbar Tandjung di atas bisa dicermati keragaman ruang-ruang pendidikan formal dan informal yang pernah dialami tokoh ini. Di satu sisi, ia mengenyam pendidikan di lingkungan Nasrani, dan di sisi lain, ia memperoleh pendidikan keagamaan Islam di tengah keluarga dan dari ibunda tercinta yang mengasuhnya. Akbar merefleksikan ruang pendidikannya yang beragam itu sebagai berikut:

Pada waktu kecil, saya banyak dibentuk oleh lingkungan yang majemuk. Seperti misalnya desa-desa di sekitar desa Sorkam banyak dihuni masyarakat beragama kristen, sehingga saya juga mengikuti suasana keagamaan mereka. Ketika mandi-mandi di Aek Sibundong pada hari Minggu, saya menyaksikan mereka, baik laki-laki maupun perempuan, pergi ke gereja naik sepeda dengan berpakaian rapi. Mereka menyeberangi sungai dengan menaiki *sampan*, semacam rakit atau getek, yang juga bisa memuat mobil dan sepeda. Suasana itu tentu juga ikut membentuk pribadi saya ... Saya bisa membaca al-Quran dan menulis huruf Arab karena jasa ibu. Ibu-lah yang menjadi model saya. Saya hampir tidak memiliki pengalaman yang spesifik dengan ayah. Ibu saya seperti ibu-ibu lain, termasuk yang taat beragama. Ibu saya banyak memberikan inspirasi pada saya mengenai agama, misalnya shalat dan puasa. Ibu saya yang paling banyak mendorong.¹⁶

¹⁵ *Ibid..*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

Kutipan di atas menegaskan keberuntungan yang diperoleh Akbar selama menempuh karakter pendidikan yang beragam di masa kanak-kanaknya hingga menjelang dewasa. Di lembaga pendidikan umum yang ia ikuti, Akbar mengenyam pendidikan yang berkualitas. Potensi kecerdasan yang tersimpan dalam dirinya menjadi lebih tajam ketika diasah di lingkungan pendidikan yang bermutu tersebut. Sementara di lingkungan keluarga besarnya, sang ibu dengan tekun mendidik Akbar dengan dasar-dasar keagamaan Islam.

Dapat dikatakan bahwa sampai pada masa pendidikannya di tingkat SMA, pendidikan Akbar ditentukan oleh dua pilar. *Pertama*, pendidikan umum yang meniscayakan dirinya untuk mengadopsi prinsip hidup kerja keras dan disiplin; dan *kedua*, pendidikan informal di lingkungan keluarga yang ia teladani langsung dari ibunya, sebagai figur paling tua dalam lingkungan keluarga besar setelah sang ayah meninggal dunia. Jadi, jika pendidikan umum yang ia peroleh di bangku sekolah telah berfungsi sebagai katalis bagi terbentuknya rasionalitas dalam diri Akbar, maka pendidikan di lingkungan keluarga berfungsi sebagai elemen bagi terbentuknya dasar-dasar keagamaan di dalam diri Akbar.

Muara dari dua pilar itu di dalam diri Akbar terejawantahkan dalam pandangan-pandangan pluralistik pada dirinya. Proses pendidikannya di SMA Kanisius tidak membawa Akbar pada situasi penisbian terhadap eksistensi keluarga besarnya yang dikenal taat beragama Islam. Pada derajat tertentu, pada sosok Akbar tercipta titik temu antara pendidikan Islam dan pendidikan di sekolah Nasrani, tanpa disertai oleh pendekrasian dirinya sebagai seorang Muslim.

Akbar tetap Muslim, baik sebagaimana dikehendaki ibunya maupun atas kehendaknya sendiri.

2. Fase Aktivitas di Organisasi Pemuda dan Mahasiswa

Setelah Akbar lulus dari SMA Kanisius pada tahun 1964, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT-UI), tepatnya di jurusan Teknik Elektro. FT-UI didirikan pada tahun 1964 oleh Professor Rosseno, seorang anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Ir. Sutami beserta kawan-kawan atas perintah Bung Karno yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Berdirinya FT-UI dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah lulusan sarjana teknik yang diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Akbar tercatat sebagai salah seorang mahasiswa angkatan pertama di Fakultas Teknik UI yang baru dibentuk itu.¹⁷

Selama tercatat sebagai mahasiswa di FT-UI, hari-hari Akbar penuh dengan berbagai aktivitas yang intens di organisasi kemahasiswaan. Di tahun-tahun awal masa kemahasiswaannya, Akbar menyaksikan pengaruh organisasi-organisasi ekstra kampus dalam membentuk dinamika mahasiswa yang begitu kuat. Pada masa itu, pembentukan corak dan orientasi dunia kemahasiswaan sangat ditentukan oleh kiprah organisasi ekstra kampus. Keberadaan mahasiswa, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok di lingkungan kampus ditentukan secara amat kuat oleh kehadiran organisasi-organisasi ekstra kampus. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajaran ketika di awal masa

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 81-83.

kemahasiswaannya Akbar langsung punya keinginan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi ekstra kampus tersebut.

Di awal masa kemahasiswaannya itu, Akbar bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menurut Akbar, pada masa itu para mahasiswa sering ditawari formulir-formulir untuk terlibat dalam aktivitas berbagai organisasi ekstra kampus, seperti GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), HMI dan lain-lain. Di saat yang sama, kawan-kawan Akbar telah banyak yang bergabung dengan HMI. Faktor ini kemudian menjadi salah satu alasan Akbar untuk memilih HMI sebagai wadah untuk berorganisasi. Di HMI-lah ia menemukan “sekolah” lain yang telah mendewasakan dan membentuk kepribadiannya serta mewarnai kesadaran dan perilaku politiknya. Sebagaimana dikutip oleh M. Deden Ridwan dan M. Muhamdajirin dari ungkapan Awaluddin, salah seorang kawan dekat Akbar, bahwa dari HMI-lah Akbar bangkit dan menjadikan dirinya sebagai gurita yang jari-jemari politiknya menyusup ke seluruh tempat.¹⁸

Intensitas keterlibatan Akbar di HMI terhitung sangat tinggi. HMI menjadi wadah artikulasi aktivitas keorganisasian Akbar dan bahkan menjadi fundamen baginya untuk terlibat dalam pelbagai gerakan politik mahasiswa pada sekitar pertengahan dekade 1960-an. Selama masa perkaderannya di HMI, Akbar seringkali memegang berbagai posisi dan peran penting di internal organisasi. Pada tahun 1969-1970 ia terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta, dan kemudian diangkat sebagai salah satu Ketua Pengurus Besar (PB) HMI periode 1970-1971. Akbar bahkan pernah menjadi Ketua Umum PB HMI pada tahun

¹⁸ M. Deden Ridwan dan M. Muhamdajirin, *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 57.

1972 hingga tahun 1974, menggantikan Nurcholish Madjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum PB HMI dalam dua periode kepengurusan.

Bagi Akbar, HMI telah menjadi semacam kawah candradimuka yang telah menggodok dirinya untuk meraih bekal guna memasuki ranah politik kepemudaan, parlemen dan pemerintahan. Di HMI, kesibukan Akbar dalam berorganisasi dari hari ke hari semakin meningkat. Ia turut hadir dalam berbagai momentum penting HMI, dan ikut pula menghadiri dan bahkan mendukung gagasan yang dikumandangkan oleh Nurcholish Madjid tentang “*Islam Yes, Partai Islam No*”, di saat masih menjadi Ketua Umum PB HMI. Selama berkader di HMI-lah Akbar menemukan wadah yang tepat baginya sebagai titik berangkat dalam keterlibatan yang lebih luas di dunia politik kelak di kemudian hari.¹⁹

Selama keaktifannya di HMI, Akbar ikut membidani dan menjadi salah seorang pemrakarsa lahirnya Kelompok Cipayung. Kelompok ini lahir dari gagasan tentang perlunya dibentuk sebuah forum untuk mempertemukan berbagai organisasi intra dan ekstra kampus yang punya latar belakang visi yang berbeda-beda. Akbar mengakui bahwa upaya ke arah pembentukan forum itu telah dirintis sebelumnya oleh PB HMI di masa kepemimpinan Nurcholish Madjid. Saat itu, di kalangan para aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi, seperti Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan lain-lain telah muncul ide untuk membentuk forum tersebut. Ketika Akbar melanjutkan estafeta kepemimpinan PB HMI setelah Nurcholish Madjid, proses

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 56-58.

pembentukan forum yang kemudian bernama Kelompok Cipayung tersebut telah mencapai tahap kematangannya. Oleh karena itu, Akbar-lah yang kemudian tercatat sebagai representasi HMI yang ikut menanda-tangani lahirnya kelompok Cipayung. Akbar mengatakan:

Kelompok Cipayung memang memiliki keterkaitan erat dengan usaha-usaha yang sudah dirintis oleh PB HMI pada periode Nurcholish Madjid. Usaha-usaha itulah yang pada masa kepengurusan saya sebagai Ketua Umum terus dikembangkan, sampai akhirnya melahirkan Kesepakatan Cipayung, sebuah deklarasi yang mengusung idealisme “Indonesia yang Kita Cita-citakan”.²⁰

Di masa Akbar menjadi Ketua Umum PB HMI, ia juga menjadi pemrakarsa lahirnya organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Seperti halnya terhadap Kelompok Cipayung, peran Akbar dalam pembentukan KNPI terkait dengan posisi KNPI di tengah kancalah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Pembentukan KNPI berawal dari sekitar awal tahun 1973. Di saat itu berlangsung suatu pertemuan antara organisasi-organisasi mahasiswa dan pemuda di Indonesia yang memunculkan ide pembentukan KNPI. Akbar termasuk tokoh penting HMI yang turut hadir dalam pertemuan itu. Dalam pertemuan tersebut Akbar menawarkan gagasan bahwa organisasi kepemudaan harus dibedakan dari organisasi-organisasi fungsional lain, seperti organisasi buruh dan petani. Jika kelompok buruh dan petani memiliki kepentingan yang bersifat fisik dan kongkret, maka kelompok mahasiswa lebih berkepentingan pada visi dan gagasan. Usulan Akbar menegaskan satu hal bahwa kehadiran KNPI tidak boleh meniadakan keberadaan organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus maupun organisasi-organisasi pemuda.

²⁰ Anwari WMK, *Bukan Sekadar Kata...*, hlm. 89.

Selain memiliki peran penting dalam pembentukan Kelompok Cipayung dan KNPI, Akbar juga aktif di organisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), meskipun keterlibatannya di AMPI tidaklah seintensif di KNPI. Bagi Akbar, AMPI memiliki spirit yang sama dengan KNPI, yaitu berada pada tataran akomodasi politik kaum muda di Indonesia. Tetapi yang membedakan keduanya ialah KNPI lebih bercorak “universal” dibandingkan AMPI, mengingat KNPI berfungsi sebagai forum komunikasi politik yang saling mempertautkan eksistensi berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Sementara AMPI sepenuhnya berfungsi sebagai organisasi kepemudaan di bawah kendali Golkar. Dalam perkembangan lebih lanjut, keterlibatan Akbar di AMPI lebih terfokus pada upaya pembinaan generasi muda.²¹

Keaktifan Akbar di organisasi ekstra kampus tersebut juga diimbangi dengan keaktifannya di organisasi intra kampus di almamaternya, Universitas Indonesia. Dengan segala kemenonjolannya, aktivitas di UI mempertegas ketokohan Akbar. Iklim keorganisasian mahasiswa di UI telah menjadi landasan bagi Akbar untuk memasuki kancah aktivitas yang lebih luas hingga pada persentuhannya dengan organisasi ekstra kampus. Ilustrasi tentang arti penting lingkungan kampus UI bagi Akbar tercermin pada posisi yang pernah ia pegang, seperti Ketua Panitia Mapram di FTUI (1967), Ketua Senat Mahasiswa FTUI (1967-1968), Ketua Panitia Mapram UI (1968) dan Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI (1968). Dari kenyataan ini bisa dikatakan bahwa UI dan HMI merupakan lingkungan yang saling bertautan satu sama lain terhadap

²¹ *Ibid.*, , hlm. 115.

pembentukan eksistensi Akbar sebagai seorang aktivis. Berbagai posisi penting di lingkungan keorganisasian mahasiswa di UI pernah ia pegang berkat kuatnya dukungan dari kalangan HMI.

Aktivitas Akbar yang intens di berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda itu tidak luput dari perhatian keluarganya. Ketika Akbar semakin aktif berorganisasi pada awal tahun 1970-an, kakaknya yang tertua, Dato Usman menjadi penopang utama berbagai kebutuhan Akbar untuk melancarkan aktivitasnya. Sang kakak malah menginstruksikan kepada salah seorang karyawannya di perusahaan Marison yang menangani bidang keuangan agar memenuhi kebutuhan Akbar akan pemberian pendidikan dan kegiatan berorganisasi.²²

Dukungan keluarga, baik dalam bentuk materi maupun semangat sangat dirasakan oleh Akbar selama ia bergelut di kancah organisasi pemuda dan mahasiswa tersebut. Dengan adanya dukungan tersebut, Akbar memiliki peluang besar untuk mengabdikan dirinya pada pengelolaan organisasi, tanpa berharap, bahwa ia akan memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas itu. Inilah yang kemudian diakui Akbar sebagai kontribusi besar terhadap dirinya, hingga pada satu fase di mana Akbar Tandjung sukses menorehkan namanya sebagai salah seorang politikus penting di negeri ini.

Dari uraian tentang kisah kehidupan Akbar dalam fase aktivitas di organisasi pemuda dan mahasiswa di atas dapat dikatakan bahwa di fase ini Akbar berada dalam kancah penemuan dirinya sebagai seorang aktivis. Ia sendiri

²² Evendhy M. Siregar, *Akbar Tandjung...*, hlm. 26-27.

menggambarkan dirinya tengah berada dalam “proses menjadi” (*to be*) seorang aktivis. Organisasi intra dan ekstra kampus yang dimasukinya menjadi wadah bagi berlangsungnya proses tersebut. Diawali dengan keterlibatannya dalam aktivitas keorganisasian mahasiswa di UI dan HMI, Akbar berkembang menjadi sosok yang sangat menonjol sebagai seorang organisatoris. Perkembangan ini menemukan konteksnya dalam kondisi bangsa Indonesia yang pada dekade 1960-an dan 1970-an yang tengah dilanda peristiwa-peristiwa besar di ranah politik.

3. Fase Kiprah Politik Nasional

Di paruh kedua dekade 1960-an, dinamika organisasi kemahasiswaan terseret ke dalam persoalan-persoalan politik Indonesia. Bagi Akbar yang saat itu sedang memantapkan dirinya sebagai seorang aktivis mahasiswa, kenyataan itu menjadi medan persinggungan yang tak bisa dielakkan, yang akhirnya mendekatkan dirinya pada dunia politik.

Persinggungan Akbar dengan dunia politik dijembatani oleh keaktifannya di KNPI, setelah dia tidak lagi aktif di HMI, tepatnya setelah masa kepengurusannya sebagai Ketua Umum PB HMI berakhir. Akbar menyadari bahwa saat itu KNPI secara politis memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Golkar. Oleh karena itu, aktivitasnya di KNPI memiliki persinggungan yang erat dengan kerja-kerja politik di Partai Golkar.²³

Secara organisatoris, KNPI memang bukan organisasi *underbouw* Golkar. Namun demikian, Akbar mengakui bahwa dalam perkembangannya, iklim organisasi yang berkembang di KNPI menjadi seirama dan bahkan mendukung

²³ Anwari WMK, *Bukan Sekadar Kata...*, hlm. 125-126.

misi pemerintah Orde Baru. Komposisi keanggotaan dan kepengurusan di KNPI pun sama pluralnya dengan di Golkar. Oleh karena itu, KNPI kemudian terstigmatisasi sebagai wadah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan kiprah politiknya di Golkar. Dari keaktifannya di KNPI lah Akbar banyak mengenal dan mulai bergaul akrab dengan para tokoh Partai Golkar yang menjadi mesin utama kekuatan politik Orde Baru.

Pada pertengahan dekade 1970-an, Akbar mulai berkenalan dan sering bergaul dengan para politisi dari Golkar, seperti Amir Moertono dan Ali Moertopo. Dua tokoh ini, masing-masing adalah Ketua Umum DPP Golkar saat itu dan arsitek pemerintahan Orde Baru, sama-sama punya andil besar dalam keaktifan Akbar di masa-masa awal di lingkungan Partai Golkar. Amir Moertono bahkan membuka peluang yang sangat lebar bagi Akbar untuk aktif di Golkar. Ia pernah secara khusus mengundang Akbar ke kantor DPP Golkar untuk mengajaknya bergabung di Golkar. Ungkapan Amir Moertono yang terekam oleh Akbar waktu itu:

Kami sudah sejak lama mengikuti kiprah Anda, kami juga sudah mengetahui pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan Anda, lalu kami berkesimpulan bahwa Anda sebagai salah seorang tokoh pemuda memiliki wawasan dan visi kebangsaan yang bagus. Kami juga mendapat masukan-masukan dari Pak Ali Moertopo tentang Anda. Oleh karena itu, kami akan mencalonkan Anda sebagai anggota DPR dan mengajak Anda untuk turut serta dalam pemilihan anggota DPR melalui Golkar mewakili Propinsi Jawa Timur.²⁴

Kutipan di atas menunjukkan bahwa ketika Amir Moertono mengajak Akbar untuk berkiprah di Partai yang dipimpinnya itu didasarkan atas pertimbangan yang matang. Keaktifan dan kiprah Akbar yang telah ia lewati di HMI dan KNPI menjadi keistimewaan tersendiri bagi Akbar. Wawasan dan visi

²⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

kebangsaan serta modal jiwa kepemimpinan yang dimiliki Akbar telah menjadi nilai tambah baginya. Oleh karena itu, Amin Moertono merasa mantap untuk mengajak Akbar bergabung di Partai yang dipimpinnya itu dan bahkan menawarkan Akbar untuk ikut dalam pemilihan anggota DPR melalui Golkar.

Faktor lain yang membuat Akbar menjatuhkan pilihannya kepada Golkar sebagai wadah bagi kiprah politiknya di level nasional adalah kepercayaan, dorongan dan semangat yang diperolehnya dari Ali Moertopo. Tokoh yang disebut terakhir ini telah mengenal Akbar sejak proses pembentukan KNPI melalui beberapa kali pertemuan. Bagi Akbar, Ali Moertopo adalah tokoh pemerintahan Orde Baru yang sangat terbuka terhadap orang-orang muda dari berbagai kalangan. Menurutnya:

Mungkin yang ada di benak Ali Moertopo ketika itu adalah bahwa tokoh-tokoh pemuda yang ada di Golkar kebanyakan berasal bukan dari kalangan organisasi Islam. Ketika bertemu dengan saya, mungkin dia berpikir bahwa saya adalah tokoh pemuda dari kalangan organisasi Islam yang memiliki wawasan kebangsaan yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran Orde Baru, sehingga dia mengajak saya bergabung dengan Golkar.²⁵

Selain dukungan dan kedekatannya dengan Amir Moertono dan Ali Moertopo, pilihan Akbar terhadap Golkar juga dilatar-belakangi oleh pemahamannya terhadap gagasan pembaruan pemikiran Islam yang disuarakan oleh Nurcholish Madjid, seniornya di HMI.²⁶ Di awal dekade 1970-an, gagasan tersebut sempat menyita perhatian umat Islam dan bahkan mengundang munculnya sikap pro dan kontra di kalangan Muslim Indonesia. Bagi Akbar, gagasan mesti mendapatkan arena pengejawantahannya dalam bentuk praktek politik yang konkret. Di ranah politik, gagasan itu berarti bahwa kesadaran politik

²⁵ *Ibid.*, hlm. 131.

²⁶ M. Deden Ridwan dan M. Muadjirin, *Membangun Konsensus...*, hlm. 61-62.

umat Islam tidak harus dimanifestasikan dalam lingkungan partai eksklusif yang menyebut dirinya partai politik Islam. Oleh karena itu, Akbar menjadi terbuka untuk memasuki partai non-Islam, tanpa ia harus menggadaikan identitas kemuslimannya. Menurut pengakuan Akbar:

Pada saat itu, belum ada aktivis Golkar di pusat yang berasal dari latar belakang PB HMI. Tapi bagi saya, hal ini tidak menjadi permasalahan serius. Sebab, ketika itu, wacana pembaruan Islam yang diusung Nurcholish Madjid *Islam Yes Partai Islam No*, sedang berkembang. Oleh karena itu, saya tidak memiliki kendala apapun untuk bergabung dengan Golkar. Terlebih saya juga memiliki pengalaman dengan lingkungan yang majemuk.²⁷

Dengan demikian, gagasan *Islam Yes Partai Islam No* yang diusung oleh Nurcholish Madjid saat itu telah melatar-belakangi pilihan Akbar terhadap Golkar secara substantif. Kenyataan ini bisa dimengerti mengingat gagasan memang butuh penerjemahan hingga di dataran pilihan praktis politis. Dengan kata lain, gagasan yang telah mengundang munculnya sikap pro dan kontra di dekade 1970-an itu membutuhkan dataran baru untuk diimplementasikan di level praktis. Dengan bekal pengalamannya berorganisasi selama di HMI dan KNPI, Akbar lantas melihat persenyawaan gagasan tersebut jika ia memilih Golkar sebagai wadah tempat ia berkiprah di dunia politik selanjutnya. Persenyawaan gagasan dan terbukanya kesempatan untuk Akbar berkiprah di Golkar tersebut di masa belakangan ia anggap sebagai pilihan yang tepat dan ia refleksikan sebagai berikut:

Tidak ada keraguan sama sekali. Ketika saya memutuskan masuk ke Golkar, yang membuat saya sangat yakin dan tidak memiliki keraguan sama sekali terutama adalah pemikiran-pemikiran filosofis Nurcholish Madjid. Apalagi Lafran Pane (pendiri HMI) juga tidak berkeberatan dengan keputusan saya. Dengan begitu, saya lebih mantap ketika memilih bergabung dengan Golkar,

²⁷ Anwari WMK, *Bukan Sekadar Kata...*, hlm. 126.

meski ada sebagian kawan yang melihat keputusan saya tersebut tidak tepat, atau bahkan dipandang sebagai keputusan yang salah.²⁸

Kiprah Akbar di Golkar dimulai sejak tahun 1978. Saat itu ia tercatat sebagai anggota parlemen dari Golkar. Kemudian, sejak tahun 1983 ia mulai merentangkan aktivitasnya di lingkaran internal partai Golkar. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1983 ia memegang jabatan Wakil Sekretaris Jendral DPP Golkar. Sejak saat itu, mulailah aktivitas politik Akbar berada dalam lingkungan dan tidak bisa dipisahkan dari partai Golkar. Secara berturut-turut ia menduduki posisi Anggota Dewan Pembina Golkar (1988-1993), Sekretaris Dewan Pembina Golkar (1993-1998) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar (1998-2004).

Di masa era pemerintahan Orde Baru, Golkar sebagai partai tempat Akbar berkiprah seringkali mendapat penilaian negatif terkait dengan sikap politik partai ini yang dinilai tidak berpijak pada proses yang demokratis. Keputusan partai pada tingkat internal selalu bercorak *top-down*. Demikian pula, jenjang karir politik para kader Golkar seringkali nampak ditopang oleh patronase politik yang kuat. Untuk mampu tampil sebagai kader Golkar yang handal, seorang kader harus pandai-pandai “mengambil hati” dan mengembangkan patronase politik para seniornya.

Meskipun stigmatisasi semacam itu juga tak jarang dilekatkan pada Akbar sebagai salah seorang kader Golkar, namun bukan berarti Akbar tidak memiliki kualitas pribadi tertentu yang turut menopang kesuksesan karir politiknya di Golkar. Dalam hal ini, sebelum berkiprah di Golkar, Akbar sudah mengembangkan dirinya sebagai kader di HMI, KNPI, sebagai calon anggota DPR dari Golkar, dan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 130.

seterusnya. Oleh karena itu, tidak benar jika kesuksesan karir politik Akbar di Golkar tidak ia tempuh dalam sebuah proses yang demokratis. Kompetisi dan persaingan tersebut telah dilalui oleh Akbar selama ia berkiprah di Golkar.

Akbar merupakan politisi Golkar yang telah melakukan kerja-kerja politik dengan penuh komitmen, ketekunan dan keuletan yang luar biasa. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, baik sebelum maupun setelah menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang, Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan politik utama rezim tersebut tak urung mendapat cacian, hujatan, celaan, dan bahkan disudutkan oleh kekerasan fisik serta diprediksikan akan ikut runtuh bersama rezim yang didukungnya. Akan tetapi, Akbar yang memegang tampuk kepemimpinan Golkar saat itu berhasil membalik prediksi tersebut, hingga akhirnya partai yang dipimpinnya itu mampu meraih kemenangan pada Pemilu 2004. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagai seorang tokoh dan politisi dari Golkar, Akbar memang layak diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di negeri ini.

Karir politik Akbar semakin menjulang ketika ia tercatat sebagai anggota parlemen di DPR/MPR RI. Selama masa tugas di parlemen dari tahun 1977 hingga 1988, Akbar tercatat sebagai anggota Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR RI mewakili Propinsi Jawa Timur. Jabatan yang kemudian disandang Akbar di parlemen secara berturut-turut adalah Wakil Sekretaris F-KP DPR RI (1882-1883), Sekretaris F-KP MPR RI (1987-1992 dan 1992-1997), Anggota Badan Pekerja MPR RI (1992-1997), Wakil Ketua F-KP MPR RI (1997-1998), dan Wakil Ketua Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI (1997-1998). Puncak karir

politik Akbar sebagai wakil rakyat digapainya pada periode 1999-2004, tepatnya ketika ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.²⁹

Hal yang patut dicatat di sini adalah bahwa ketika Akbar menjabat sebagai Ketua DPR RI di era reformasi, situasi politik di parlemen sangat berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru. Parlemen pada era reformasi jauh lebih asertif dibandingkan dengan parlemen di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, parlemen dinilai oleh publik sekedar sebagai alat pengesah bagi kebijakan pemerintah. Di hadapan pemerintah Orde Baru, daya tawar politik parlemen sangat lemah. Sebaliknya, pada era reformasi, fungsi kontrol parlemen terhadap kekuasaan eksekutif sangat kuat. Dalam situasi yang demikian itulah Akbar menjadi Ketua DPR RI. Situasi tersebut sekaligus secara langsung menjadi arena untuk menguji kiprah dan ketokohan Akbar di dunia politik.

Selain pernah menorehkan langkah-langkah politiknya di parlemen, Akbar juga berkarir di lembaga pemerintahan. Pada tahun 1988-1993, ia menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga di Kabinet Pembangunan V. Selanjutnya, pada tahun 1993-1998, tepatnya pada Kabinet Pembangunan VI, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat, yaitu pada Kabinet Pembangunan VI. Pada 1998 ia menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman dalam Kabinet Pembangunan VII. Setelah Orde Baru tumbang, Akbar sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara sepanjang periode 1998-1999 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm. 143.

³⁰ “Mengenal Bang Akbar Lebih Dekat”, dalam *Medium*, No. 93 TH. V 05-18 Mei 2008, hlm. 22.

Akbar juga seringkali mewakili Indonesia di dunia internasional. Pada tahun 1972, ia mengikuti *Asia and Pasific Students Leaders Program-Department of State USA* yang berlangsung selama tiga bulan. Di tahun 1974, ia mengikuti pertemuan Majelis Pemuda se Dunia (*World Assembly of Youth*) di Nakhadka, Rusia. Lalu, pada tahun 1988, ia memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri-menteri Olah Raga se-Dunia di Moskow. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1990, ia memimpin Delegasi Indonesia dalam dialog Malaysia-Indonesia (Malindo), di Kuala Lumpur. Ia juga mengikuti Seminar Federasi Real Estate Sedunia (FIABCI), di Paris, Perancis, pada tahun 1995.³¹

Kemudian pada tahun 1996, Akbar mengikuti Kongres Habitat II di Nairobi, Afrika. Di tahun 1998, ia mengikuti KTT ASEAN di Hanoi. Satu tahun berikutnya, ia memimpin Delegasi Indonesia dalam Sidang *International Parliament Union* (IPU) di Yordania. Pada tahun 2000, ia memimpin delegasi pada Sidang *Inter-Parliamentary Union* (IPU) di Jakarta. Pada tahun yang sama ia juga memimpin Delegasi pada sidang AIPO di Singapura. Selanjutnya, pada tahun 2001 ia memimpin Delegasi pada Konferensi Ketua-Ketua Parlemen Se-Dunia, di New York. Ia juga pernah memimpin Delegasi pada Sidang AIPO di Thailand pada tahun yang sama, dan memimpin Delegasi pada sidang AIPO di Vietnam pada tahun 2002.³²

Buah dari kiprahnya di berbagai kegiatan organisasi dan aktifitas politik serta pemerintahan tersebut, Akbar memperoleh banyak penghargaan. Pada tahun 1992, ia memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Pemerintah Republik Indonesia. Ia juga memperoleh penghargaan *Kruis in de Orde van Oranje-Nassau* dari Pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1996. Ia juga pernah memperoleh penghargaan Bintang Republik Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1998.³³

Dari perjalanan panjang karir politik Akbar selama ia berkiprah di kancah politik nasional sebagaimana telah penulis paparkan secara umum di atas, dapat disimpulkan bahwa Akbar benar-benar telah mengabdikan dirinya untuk berkarya di ranah politik. Keterlibatan dan kiprah yang penuh ini telah menjadikan Akbar sebagai figur politikus yang handal dengan kapabilitas yang telah teruji dalam memimpin partai politik. Ia tidak hanya telah berbuat sebagai seorang politikus yang mengikuti rambu-rambu politik yang ada di negeri ini, tetapi juga berupaya melakukan pembaruan-pembaruan di ranah politik Indonesia.

B. Aktivitas Kemasyarakatan Akbar Tandjung

Seusai masa jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan tidak lagi bekerja di institusi pemerintahan atau aktif di parlemen, Akbar memusatkan aktivitasnya pada kegiatan kemasyarakatan. Ia merintis berdirinya lembaga pengkajian dan mengembangkan lembaga pendidikan yang pada masa sebelumnya telah digagasnya, yakni ketika ia masih aktif di dunia politik dan pemerintahan. Dalam soal aktivitas pengkajian dan penelitian, Akbar mendirikan sebuah lembaga yang bernama Akbar Tandjung Institute. Sedangkan dalam soal aktivitas pendidikan, ia mendirikan Yayasan Matauli dan Yayasan Bina Insan Cita.

³³ <http://www.bangakbar.com>

Yayasan Matauli merupakan yayasan yang didirikan oleh Akbar bersama dengan para tokoh masyarakat yang berasal dari Sibolga dan Tapanuli Tengah yang menetap di Jakarta. Nama “Matauli” adalah singkatan dari Maju Tapian Nauli. Artinya, alasan di balik didirikannya yayasan ini adalah dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia di wilayah Tapanuli Tengah. Kegiatan nyata yang pernah ditorehkan oleh Yayasan ini adalah pendirian sekolah unggulan di Tapanuli Tengah pada tahun 1991. Ketika sudah tidak lagi aktif di dunia politik dan pemerintahan, sekolah ini menjadi salah satu fokus perhatian Akbar di bidang pendidikan.³⁴

Sekolah yang didirikan oleh Yayasan Matauli ini adalah SMAN 1 Plus Matauli Pandan. Sekolah ini didirikan berawal dari keprihatinan Akbar dan para pendiri lainnya terhadap kemajuan bidang pendidikan di Tapanuli Tengah, terutama di Sibolga. Sekolah ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk memajukan dunia pendidikan di sana, yang di awali dengan upaya pemberian bantuan untuk biaya hidup dan dana pendidikan anak-anak Sibolga. Di jangka panjang, sekolah ini diharapkan akan mampu melahirkan lebih banyak tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Tapanuli Tengah. Di brosur sekolah ini Akbar menulis:

... pada hakikatnya pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam upaya meningkatkan kecerdasan bangsa. Di sisi lain, berdasarkan pengamatan kita melihat bahwa para anak didik kita yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air memiliki potensi dan kemampuan yang cukup besar, yang bila diberikan kesempatan untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan yang baik, terarah dan intesif merupakan sumber daya yang sangat potensial dan tangguh mendukung keberhasilan Pembangunan Nasional.³⁵

³⁴ Evendhy M. Siregar, *Akbar Tandjung...*, hlm. 99-100.

³⁵ Anwari WMK, *Bukan Sekadar Kata...*, hlm. 259.

Pengembangan kualitas SMAN I Plus Matauli Pandan telah dilakukan sejak sekolah ini didirikan. Upaya lebih lanjut berlangsung di tahun 1994 ketika para pengurus yayasan Matauli berhasil menjalin kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sekolah tersebut diakui sebagai salah satu sekolah negeri. Atas terobosan kerjasama itu, para guru yang semula berstatus sebagai guru swasta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, kerja yayasan selanjutnya lebih terkonsentrasi pada penyediaan dana operasional, kesejahteraan guru dan karyawan serta pemeliharaan lingkungan.

Aktivitas kemasyarakatan Akbar lainnya di ranah pendidikan ia wujudkan dengan membentuk lembaga yang bernama Yayasan Bina Insan Cita. Lembaga ini didirikan Akbar bersama dengan kawan-kawannya yang pernah aktif di organisasi HMI. Lembaga ini memfokuskan kegiatannya dalam hal pengembangan sumber daya manusia lewat berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti kader-kader HMI sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Di samping itu, lembaga ini juga mengupayakan penyediaan beasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang pernah berkiprah di HMI.³⁶

Inisiatif didirikannya Yayasan Bina Insan Cita ini berawal dari keinginan Akbar di saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Saat itu ia berpikir tentang sesuatu yang bisa ia perbuat untuk HMI yang telah menjadi wadah utama kiprahnya di organisasi. Ia sekaligus hendak mengungkapkan rasa syukurnya kepada HMI, karena dalam perjalanan hidupnya sebelum berkiprah di institusi pemerintahan dan parlemen, Akbar telah mendapatkan kesempatan yang

³⁶ *Ibid.*, hlm. 260.

amat luas untuk mengaktualisasikan dirinya di HMI. Yayasan ini telah memiliki kantor sendiri di Depok. Pembiayaan untuk pembangunan gedung yang dijadikan kantor tersebut sepenuhnya dihasilkan dari usaha para alumni HMI yang digalang oleh Akbar.³⁷

Fokus perhatian Yayasan Bina Insan Cita dalam hal pengembangan sumber daya manusia juga memiliki tujuan yang senada dengan misi utama kaderisasi di HMI, yakni untuk membentuk kader-kader bangsa yang memiliki wawasan keislaman dan keindonesiaaan, serta senantiasa terpanggil untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal pemberian beasiswa, Yayasan Bina Insan Cita bertolak dari kesadaran bahwa banyak dari kader HMI memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan tetapi tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan. Beasiswa diberikan kepada para aktivis HMI yang sedang menempuh pendidikan di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, baik yang sedang menempuh jenjang S1, S2, maupun S3. Sejak tahun 1996, Yayasan Bina Insan Cita telah memberikan beasiswa kepada 216 orang mahasiswa S1, 85 orang mahasiswa S2, dan 31 orang mahasiswa S3.³⁸

Sementara di wilayah pengkajian dan penelitian, Akbar mendirikan sebuah lembaga yang bernama Akbar Tandjung Institute. Lembaga ini ia dirikan bersama teman-temannya tidak berapa lama setelah ia berhasil meraih gelar doktor ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Akbar mendambakan lembaga yang dibentuknya itu menjadi wadah belajar sosial-politik yang bersih. Pelbagai

³⁷ *Ibid.*, hlm. 260-261.

³⁸ *Ibid.*

kegiatan seperti diskusi, penerbitan buletin, pendidikan dan pelbagai pencerahan politik lainnya mengisi agenda kegiatan di lembaga ini.

Berdirinya Akbar Tandjung Institute berawal dari kegelisahan Akbar terhadap perkembangan politik sejak era reformasi bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yang lalu. Perkembangan tersebut telah membawa pada perubahan wajah perpolitikan di Indonesia secara sangat signifikan. Proses yang dijalani Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis menjadi sangat kompleks ketika reformasi mulai bergulir. Berbagai format perubahan terhadap perundangan, peraturan, dan tata hubungan kelembagaan tinggi negara muncul sebagai alternatif untuk kelembagaan yang telah ada dan telah berjalan. Transformasi politik semacam itulah yang telah mengubah persepsi masyarakat tentang praktek politik di Indonesia.³⁹

Implikasi dari perubahan persepsi masyarakat terhadap praktik politik di indonesia itu adalah munculnya perhatian masyarakat yang semakin besar terhadap proses demokratisasi dalam pengelolaan berbagai segi kehidupan. Demokrasi memperoleh pemaknaan yang beragam di lembaga pelaksana negara, pasar, dan masyarakat sipil. Di titik inilah, Akbar Tandjung Institute hadir untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia di era reformasi ini. Lembaga ini hadir untuk menggalakkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan di dunia politik Indonesia.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 252-253.

⁴⁰ *Ibid.*.

Akbar sendiri mengakui bahwa Akbar Tandjung Institute yang ia dirikan itu merupakan bagian dari idealismenya dalam rangka pembangunan politik dan demokrasi di negara ini. Menurutnya, lembaga ini merupakan wadah untuk membangun pikiran dan gagasan dalam pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga ini memiliki tujuan dan bertekad untuk turut mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai etis dan transparan dalam berbagai dimensi kehidupan. Tujuan tersebut diartikulasikan lewat pendidikan politik, kegiatan pengkajian, penerbitan, pendidikan dan penelitian. Bertolak dari tujuan dan artikulasinya itu, Akbar Tandjung Institute mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dipandang kompeten dan memiliki komitmen untuk membangun tradisi demokrasi di Indonesia.⁴¹

Sekelumit aktivitas kemasyarakatan yang digeluti Akbar di atas menunjukkan bahwa pilihan Akbar untuk tetap bersentuhan dengan realitas politik di Indonesia masih berlangsung, meskipun ia secara praktis tidak lagi aktif di institusi politik di negeri ini. Ia tetap mengupayakan perluasan aktualisasi dirinya di bidang politik dalam bentuk lain. Inilah sebuah perluasan aktualisasi diri Akbar yang lebih mengedepankan nilai dan kebijaksanaan politik melalui refleksi terhadap sepak terjang dirinya dalam kancah politik praktis. Semua itu tidak hanya menegaskan ketokohan sosok politikus ini, tetapi juga menunjukkan keseriusannya dalam memilih dan berkiprah di ranah politik Indonesia.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 253-255.

BAB III

ETIKA POLITIK:

KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

A. Etika Politik: Konsep Dasar dan Perkembangannya

Etika pada dasarnya merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sebagai sebuah usaha ilmiah, filsafat dibagi ke dalam beberapa cabang. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoretis dan filsafat praktis. Filsafat teoretis mempersoalkan hal-hal yang ada (*being*). Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di wilayah ini adalah: apa itu manusia, alam, hakikat realitas, apa itu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan filsafat praktis mengarahkan pada bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada (*being*) itu.

Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika berfungsi sebagai metode penyelidikan tentang nilai dan tingkah laku manusia. Pada dasarnya, etika mempersoalkan pertimbangan nilai dalam tingkah laku manusia. Etika berbeda dengan estetika yang lebih mempersoalkan tentang pertimbangan nilai dalam seni.¹

Etika terdiri dari etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip dasar itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya. Dari sinilah berlaku beberapa etika yang berkaitan dengan bidang pekerjaan manusia, seperti etika kedokteran, etika pendidikan dan etika politik.

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 8.

Sebagai sebuah ilmu dan cabang filsafat, etika politik lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai runtuh. Keruntuhan struktur politik tersebut mengakibatkan sebagian filosof politik mulai mempertanyakan bagaimana mestinya masyarakat ditata. Diskursus tentang etika politik kembali mengemuka sejak datangnya zaman modern, di mana legitimasi kekuasaan raja dalam pandangan feudalisme mulai dipertanyakan dan digugat. Legitimasi agama dan kerajaan yang diterima begitu saja untuk memerintah masyarakat mulai dipertanyakan.²

Pada zaman sebelum masa Pencerahan sudah terdapat pembahasan atas beberapa unsur etika politik dari beberapa karya dari filosof politik klasik semisal Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Ibnu Khaldun. Dalam karya sentralnya *Politeia*, misalnya, Plato telah memperbincangkan salah satu prinsip etika politik, yaitu keadilan. Ia menolak berbagai pendapat sinis yang mengungkapkan bahwa keadilan tidak lebih merupakan kepentingan dari pihak yang kuat. Penguasa adalah diktator yang memaksakan kepada rakyat hukum-hukum yang seakan-akan adil tetapi sebenarnya menguntungkan dirinya sendiri. Bagi Plato, masalah keadilan adalah masalah hakiki kehidupan. Ia tak dapat ditinggalkan dan diabaikan hanya karena ketidak-adilan dari penguasa. Kebahagiaan hidup yang sejati, menurut Plato adalah sejauh seseorang meninggalkan egoisme dan pemuasan nafsu dengan menjunjung nilai-nilai yang abadi –salah satunya adalah keadilan. Karenanya keadilan bukanlah sekedar tirai asap (*smoke screen*)

² *Ibid.*, hlm. 3.

kepentingan kaum penguasa belaka melainkan prasyarat kesejahteraan dan kebahagiaan.³

Selain Plato, tercatat pula Aristoteles yang membedakan antara filsafat teoretis dan praktis. Bagi Aristoteles, etika termasuk dalam kategori filsafat praktis. Dalam *Etika Nikomacheia*, Aristoteles menjelaskan bahwa untuk mencapai hakikat kehidupan yang baik dan utama, seperti keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, maka yang dibutuhkan adalah sebuah etika yang mengatur bagaimana mestinya manusia bertindak.⁴

Di Abad Pertengahan, etika politik berkaitan dengan pengaturan tindakan manusia di bawah suatu hukum yang berlaku untuk seluruhnya, termasuk soal keadilan dan kewargaan. Cicero adalah salah satu filosof politik yang menyatakan bahwa hubungan manusia bersandar pada hukum. Tetapi hukum yang dimaksud adalah hukum alam (*natural law*), dimana semua manusia tunduk pada hukum ini. Hukum alam ini bukanlah hukum-hukum dalam pengertian sebagaimana dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam sekarang, melainkan seperangkat tata aturan yang berasal dari Tuhan. Pangkal utama dari hukum-hukum semacam ini adalah kehendak dan perintah Tuhan di satu sisi, dan kehendak penguasa dalam negara di sisi lain. Jadi, di masa Abad Pertengahan, etika politik berkisar pada kepatuhan pada hukum alam ini, hukum Tuhan dan hukum penguasa. Sebab kepala negara adalah juga kepala agama.⁵

³ Frans Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 15.

⁴ *Ibid.*, hlm. 39-40.

⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 87.

Memasuki Abad Modern, seiring dengan munculnya pencerahan (*renaissance*) dan gerakan reformasi, timbul suatu upaya pembaruan di lapangan sosial-politik dan kebudayaan, yang tidak mau lagi mengikatkan diri pada kegerejaan dan tradisi keagamaan, serta ingin menyatakan kebebasan akal dan kehendak untuk maju. Sejak saat itu, wacana etika politik tidak lagi mengenai ketaatan terhadap hukum agama dan kerajaan, melainkan mulai menggugat dan mempertanyakan segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dan meminta pertanggung-jawabannya pada prinsip-prinsip moral dasar. Etika politik di zaman modern membongkar segala macam klaim-klaim kekuasaan, membedah segala macam ideologi-ideologi yang bersemayam dalam kekuasaan, dan menyingkap kepentingan-kepentingan yang bersembunyi di balik klaim-klaim kebenaran dan dalil-dalil penataan masyarakat.⁶

Ringkasnya, etika politik di zaman modern berupaya untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana seharusnya bentuk lembaga-lembaga kenegaraan seperti hukum dan negara (misalnya: bentuk negara seharusnya demokratis). Etika politik jenis ini berkaitan dengan bagaimana etika institusi kelembagaan publik berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial, demokrasi, dan kesetaraan. *Kedua*, apa yang seharusnya menjadi tujuan dan sasaran segala kebijakan politik. Etika politik jenis ini berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan publik yang demokratis, setara dan berkeadilan.

Pada abad modern, utamanya dimulai sejak awal abad ke17, terdapat beberapa varian isu yang berkembang dalam wacana etika politik. Bentuk yang

⁶ Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat Modern* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 94.

paling awal dari gagasan etika politik di awal abad modern adalah gagasan tentang pemisahan kekuasaan agama dan negara. Pemisahan ini bukan untuk menolak segala macam moralitas agama di ranah publik atau untuk mengafirmasi ketiadaan moralitas yang diinspirasikan oleh agama di ranah politik, melainkan untuk menghindarkan kekuasaan mutlak yang terpusat atau totalitarianisme.

Tokoh yang terkenal mengusung gagasan ini adalah John Locke, seorang yang dikenal sebagai sosok yang sangat tidak menyukai kekuasaan mutlak di tangan penguasa. John Locke menolak ide bahwa kekuasaan politik mestinya dilandaskan pada garis keturunan dan warisan, seperti dalam model kerajaan. Bagi Locke, semua manusia mestinya lahir dalam persamaan dan kebebasan dan berhak untuk menentukan model kehidupan publik (politik) secara sukarela melalui perjanjian bersama tanpa ada pemaksaan, dominasi, dan persakan kebebasan dan kemerdekaan manusia yang satu atas manusia yang lainnya.⁷

Gereja dan negara (atau masyarakat sipil dalam istilah Locke), menurut Locke, adalah dua entitas yang berbeda, dan masing-masing memiliki ‘teritorinya’ sendiri. Negara atau masyarakat sipil dibentuk untuk “memajukan kepentingan-kepentingan sipil mereka sendiri, yaitu hidup, kemerdekaan, kesehatan, kepemilikan, dan benda-benda material lainnya, seperti uang, tanah, rumah, perabot dan sebagainya. Sementara gereja adalah kumpulan manusia secara sukarela, untuk memuja Tuhan dengan cara-cara yang berbeda.

Sementara bentuk yang lain dalam wacana etika politik yang juga ditumbuh-kembangkan dari pemikiran John Locke adalah gagasan tentang

⁷ Deliar Noer, *Pemikiran Politik...,* hlm. 122.

kebebasan berfikir dan beragama. Semua manusia, dalam gagasan John Locke, memiliki kondisi alamiah, yaitu kebebasan dan kemerdekaan yang juga dibatasi oleh hukum-hukum alam. Hukum alam ini, menurut Locke, berfungsi sebagai pembatas dan pemberi ketentuan agar tidak seorang pun dibenarkan merusak orang lain dalam hal kehidupan dan kematiannya, kesehatannya, kemerdekaannya dan kepemilikannya. Dalam hal kebebasan beragama, selain menyatakan bahwa negara harus menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu warganya, Locke juga mendukung nilai-nilai pluralisme dan keberagaman dalam keberagamaan dan mencela setiap bentuk kekerasan yang berdalih agama untuk memaksakan kehendak.⁸

Untuk memastikan kehidupan publik yang demokratis dan setara, maka dibutuhkan suatu pola pengelolaan kehidupan publik yang memisahkan dan membagi kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsinya. Gagasan tentang pembagian kekuasaan ini diprakarsai oleh gagasan John Locke dan Montesquieu yang membagi kelembagaan kekuasaan menjadi tiga (*trias politika*), yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan yudikatif, atau kekuasaan untuk mengadili, dan kekuasaan eksekutif eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Pembagian kekuasaan ini adalah dalam rangka untuk memastikan kemerdekaan, demokrasi, dan kesetaraan. Sebab, menurut Montesquieu, apabila kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif disatukan pada tangan yang sama, maka tidak akan mungkin terdapat kemerdekaan dan demokrasi, karena dengan demikian urusan publik akan

⁸ Ian Shapiro, *Asas Moral dalam Politik* (Jakarta: Obor, 2003), hlm. 9.

dikerjakan dengan sekehendak hati, dan akan terjatuh kembali pada model feodalisme pra-modern.⁹

Idealnya, menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif atau pembuat aturan dan undang-undang, mestinya adalah seluruh rakyat. Namun, karena akan menimbulkan kesulitan yang teramat pelik jika melibatkan banyak orang, maka dalam pelaksanannya kekuasaan legislatif akan dilakukan oleh perwakilan-perwakilan rakyat. Sistem perwakilan ini, menurut Montesquieu, haruslah secara seimbang mempertimbangkan dua bentuk kelompok masyarakat pada waktu itu, yaitu kelompok bangsawan dan kelompok rakyat biasa, yang masing-masingnya memiliki hak veto atas lainnya. Dengan pola dua kamar (*kamer*) semacam ini diharapkan akan terjadi saling kontrol dan mengawasi, serta menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penindasan satu golongan atas golongan yang lainnya. Montesquieu menekankan bahwa pembagian tiga kekuasaan politik ini dimaksudkan agar masing-masing saling mengawasi dan menghambat kemungkinan penyelewengan. Jika pembagian kekuasaan ini tidak dilakukan, maka pengelolaan kehidupan publik akan terjatuh dalam despotisme atau kekuasaan yang sewenang-wenang.¹⁰

Sedangkan sumbangan Jean-Jacques Rousseau dalam wacana etika politik terletak dalam pandangannya tentang kedaulatan rakyat –suatu nilai yang merupakan salah satu gagasan terpenting dalam wacana etika politik kontemporer. Rousseau hidup di zaman monarki absolut Perancis. Karena itu, ia cenderung menolak segala bentuk negara absolut dan harus digantikan dengan modern yang

⁹ Deliar Noer, *Pemikiran Politik....*, hlm. 136.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

secara langsung mengungkapkan kehendak rakyat sendiri. Dengan gagasan ini Rousseau hendak mengeliminasi terserapnya individu dalam kehendak absolutis negara. Untuk mencegah hal itu, maka menurut Rousseau, semestinya negara merupakan manifestasi dari *res publica*, dari kehendak individu yang menjadi kehendak umum.¹¹

Oleh karena itu, satu-satunya negara yang sah menurut Rousseau adalah negara republik yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pelembagaan kedaulatan rakyat, menurut Rousseau, bukanlah sesuatu yang tepat. Sebab pada dasarnya kedaulatan rakyat adalah mutlak dan pelembagaan rakyat dalam bentuk perwakilan akan membuat kedaulatan rakyat itu pada akhirnya akan tersisih. Oleh karena itu, sebagai ganti dari negara yang berbasis demokrasi liberal, sebagaimana diangangkan oleh Locke dan Montesquieu, Rousseau justru menyukai demokrasi langsung, dimana undang-undang dibuat secara langsung dalam plebisit rutin dan pertemuan rakyat. Sementara pelaksanaan eksekutif dibatasi oleh putusan-putusan rakyat. Pemerintahan diangangkan oleh Rousseau sebagai menyerupai kepanitiaan yang diangkat oleh rakyat untuk jangka waktu yang pendek untuk melaksanakan kehendak rakyat yang terartikulasikan dalam undang-undang.

B. Pilar-pilar Dasar Etika Politik Kontemporer

Pada akhirnya, seiring dengan laju perkembangan pemikiran dan filsafat, wacana etika politik juga semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam perkembangan wacana politik kontemporer. Beberapa sumbangan dari pemikiran

¹¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik....*, hlm. 240.

filsafat sosial dan politik pada akhirnya membentuk pilar-pilar dasar dalam etika politik kontemporer.

Pilar-pilar dasar ini setidaknya terdiri dari dua hal. *Pertama*, menyangkut prinsip-prinsip dasar etika politik kontemporer. Prinsip-prinsip ini merupakan hasil dari pergumulan dan refleksi atas kenyataan hidup sosio-politik kontemporer. Prinsip-prinsip ini setidaknya pada saat ini menjadi sebuah prinsip dan panduan-panduan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan publik, meskipun seringkali terjadi pengingkaran atasnya.

Kedua, dimensi-dimensi etika politik. Jika yang pertama, prinsip-prinsip dasar etika politik, merupakan panduan-panduan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan publik, maka yang kedua, yaitu dimensi-dimensi etika politik, lebih merupakan panduan atas kajian tentang etika politik. Dimensi etika politik ini bertujuan agar kajian etika politik tidak disederhanakan dan disalah-artikan dengan sekedar moralitas politik atau budaya politik.

1. Prinsip-prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer

Beberapa prinsip dan nilai-nilai dasar dalam etika politik kontemporer adalah; demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip universal ini pada dasarnya berakar dari kajian-kajian filsafat politik dan teori sosial dalam merefleksikan kehidupan publik kontemporer.

Demokrasi yang dimaksudkan sebagai prinsip dan nilai mendasar dalam etika politik kontemporer adalah pemahaman tentang demokrasi sebagai kedaulatan rakyat, yang bisa dibedakan dari model kekuasaan yang diatur oleh segelintir orang dalam aristokrasi atau oligarkhi, dan kekuasaan yang diatur oleh

penguasa tunggal atau monarkhi. Prinsip yang paling inti dari gagasan demokrasi adalah kebebasan, kesetaraan, dan kemerdekaan.¹²

Implikasi dari diletakkannya kebebasan, kesetaraan, dan kemerdekaan sebagai prinsip etika politik maka tak ada manusia, atau elit, atau sekelompok ideologi, atau sekelompok orang yang berhak untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Hal ini juga berarti bahwa semua warganegara memiliki akses yang setara pada kekuasaan, dan semua warga negara boleh menikmati kebebasan dan kemerdekaannya.

Gagasan tentang bagaimana memastikan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kemerdekaan itu berjalan dalam kehidupan publik berimplikasi pada beragamnya makna demokrasi. Robert A. Dahl, misalnya, mendefinisikan sebuah masyarakat disebut demokratis, jika ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: hak untuk memilih; hak untuk dipilih; hak bagi para pemimpin politik untuk berkompetisi untuk memperoleh dukungan dan suara; ada pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil; kebebasan untuk berkumpul dan berserikat; kebebasan untuk berkekspresi dan mengeluarkan pendapat; kebebasan untuk memperoleh informasi alternatif. Seperti halnya para pengaruh demokrasi liberal yang lain, Dahl memfokuskan kajiannya tentang demokrasi dalam aras ‘institusi dan prosesnya’.¹³ Sementara Larry Diamond lebih menekankan pada ‘nilai-nilai demokrasi’ yang menurutnya terdiri dari: kebebasan politik, hak warganegara

¹² Mokhtar Lubis, “Kata Pengantar”, dalam Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (eds.), *Demokrasi Klasik dan Modern* (Jakarta: Obor, 2005), hlm. xii.

¹³ Coen Husain Pontoh, *Malapetaka Demokrasi Pasar* (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm. 7.

untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, kesetaraan di hadapan hukum, dan kesetaraan untuk kaum perempuan.¹⁴

Selain gagasan tersebut, perkembangan gagasan demokrasi kontemporer lebih mengarah bagaimana memastikan kedaulatan rakyat tidak dibajak oleh oligarkhi atau aristokrasi. Karena itu, gagasan tentang demokrasi partisipatoris dan demokrasi inklusif mengemuka. Gagasan demokrasi partisipatoris adalah sebuah upaya untuk meraih konsensus rakyat yang lebih besar dan secara langsung, yang diasumsikan gagal dalam model demokrasi perwakilan, dalam hal menentukan keputusan dan kebijakan publik, melakukan kontrol, dan atau secara langsung terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Sementara demokrasi inklusif adalah sejenis demokrasi yang berupaya untuk menginklusikan elemen-elemen masyarakat yang di-liyan-kan (*othered*) oleh struktur sosial dalam kehidupan politik publik, sembari menekankan pada penerimaan atas perbedaan dan keberagaman, bahkan mengijinkan adanya bentuk-bentuk pembangkangan dan perlawanan dalam sistem. Terlepas dari apapun bentuk teorisasi demokrasi, tetapi prinsip dasarnya yang berupa kebebasan, kesetaraan, kedaulatan rakyat, serta upayanya dalam menghindari bentuk-bentuk kekuasaan yang despotik dan totaliter, merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang tak dapat diabaikan dalam kehidupan sosio-politik masyarakat kontemporer.

Prinsip dasar yang kedua dalam etika politik kontemporer adalah pluralisme atau penghargaan dan pengakuan terhadap keberagaman dan keberbedaan.

¹⁴ Rita Abrahamsen, *Sudut Gelap Kemajuan* (Yogyakarta: Lafadl, 2000), hlm. 12.

Pluralisme berasal dari kata “*plures*” yang berarti “beberapa” dan memiliki implikasi perbedaan. Pluralisme dengan kata lain adalah suatu kesediaan untuk menerima pluralitas atau keberbedaan untuk dirajut dalam suatu kehidupan yang positif, damai, dan toleran. Implikasi dari pluralisme ini adalah pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, dan lain sebagainya. Karena itu, adalah penting untuk meletakkan pluralisme sebagai dasar penyelenggaran kehidupan publik.

Dalam konteks penyelenggaraan kehidupan publik, mesti pihak yang mestinya menjamin agar nilai-nilai pluralisme tetap menjadi landasan adalah negara. Sebagai entitas politik publik, negara mesti menjaga prinsip imparsialitas dan netralitas sejauh berkaitan dengan kebebasan beragama. Mandat utama negara dalam konteks ini adalah memberikan pengakuan dan penghargaan atas pluralisme, dan menjadi wasit yang adil bagi kehidupan publik.¹⁵

Sementara hak asasi manusia yang dimaksud sebagai dari prinsip etika politik adalah pemahaman bahwa manusia memiliki martabat, hak-hak alamiah yang tak dapat dicabut seperti hak atas hidup, hak atas kepemilikan, dan hak untuk kebebasan. Hak-hak sebagaimana disebutkan di atas hak yang tak dapat dicabut (*inalienable rights*) dari kehidupan manusia, dan mestinya berlangsung secara abadi (*eternal*). Sebab pada dasarnya manusia lahir dan hidup dalam keadaan bebas, memiliki martabat dan hak-hak yang melekat di dirinya sebagai seorang manusia. Karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak

¹⁵ I. Bambang Sugiharto dan Agus Rachmat W, *Wajah Baru Etika dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 145.

Asasi Manusia (DUHAM), setiap manusia setidaknya memiliki hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan hak untuk keamanan.¹⁶

Dalam perkembangannya, terdapat dua generasi hak asasi manusia yang terus berkembang. Pada generasi pertama, muncul hak-hak individu yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik. Generasi pertama dari hak asasi manusia ini terjadi seiring dengan berkembangnya gerakan Pencerahan dan Revolusi Industri di Inggris pada abad 17-18. Beberapa tokoh yang menopang gagasan ini adalah para filosof hak-hak alamiah seperti John Locke, Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, dan lainnya. Sementara generasi kedua adalah berkembangnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Generasi kedua hak asasi manusia ini terjadi pada abad ke 19 dan 20.

Berbeda dengan hak-hak sipil dan politik yang bercorak liberal, para pendukung hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) adalah mereka yang secara ideologis bercorak sosialis. Hak ekosob ini berupaya menjamin kehidupan masyarakat, utamanya masyarakat yang tertindas, agar dapat hidup tanpa ada eksploitasi, dominasi dan hegemoni dari pihak yang lan yang dapat mengancam pemenuhan kemanusiannya.¹⁷

Hingga saat ini telah banyak bermunculan hak-hak baru, seperti hak-hak perempuan, hak anak-anak, hak untuk kaum transeksual, hak minoritas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memiliki pekerjaan, hak berpartisipasi dalam politik, hak untuk menikmati hasil pembangunan, dan bahkan hak untuk melakukan perlawan. Berbagai kemunculan hak-hak baru dalam wacana asasi

¹⁶ Universal Declarations of Human Rights, lihat: <http://www.unhcr.ch/udhr/lang/eng.htm>

¹⁷ Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal* (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 4.

manusia ini dimungkinkan karena hingga saat ini belum ada suatu sistem sosial dan politik yang dapat menjamin secara penuh pemenuhan hak-hak tersebut. Karena itu, sebagai dasar pengaturan kehidupan publik, ratifikasi atas sejumlah konvensi hak asasi manusia mutlak diperlukan.¹⁸

2. Dimensi Etika Politik

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, pentingnya mengkaji dimensi-dimensi etika politik adalah supaya kajian etika politik tidak disederhanakan dan disalah-artikan dengan sekedar moralitas politik atau budaya politik. Etika politik mengandung tiga dimensi: *pertama* adalah tujuan politik; *kedua* menyangkut sarana-sarana politik; dan *ketiga* berhadapan dengan aksi politik.

Dimensi tujuan politik dirumuskan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam negara demokratis, pemerintah bertanggung jawab atas kedua komitmen itu. Fokus utama ialah upaya penerapan kebijakan umum (*policy*) dalam manajemen publik. Dimensi tujuan politik dalam kebijakan umum dari suatu pemerintah terwujud dalam prioritas, program, metode, dan pendasaran filosofisnya. Atas dasar kebijakan umum inilah wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggung-jawaban.¹⁹

Dimensi tujuan politik dengan demikian merupakan suatu hal yang sangat penting sebab tanpa adanya tujuan kebijakan publik, maka pengelolaan kehidupan

¹⁸ David Beetham, *Democracy and Human Rights* (Cambridge: Polity Press, 2003), hlm. 116.

¹⁹ Haryatmoko, "Dimensi-dimensi Etika Politik", dalam *Kompas*, Rabu, 5 Maret 2003.

publik akan berjalan secara pragmatis, tanpa preferensi ideologis atau filosofis.

Ketiadaan dimensi tujuan politik membuat sebuah pemerintahan berjalan tanpa visi yang tegas tentang apa yang hendak dicapainya. Sebaliknya, jika sebuah pemerintahan memiliki tujuan politik yang tegas, maka hal ini akan menunjukkan ketajaman visi sebuah pemerintahan. Karena itu, dimensi moral dari tujuan politik terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas kebijakan umum dan akuntabilitasnya.²⁰

Dimensi etika politik kedua ialah sarana politik dalam pencapaian tujuan (*polity*). Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan institusi-institusi sosial. Hal terakhir ini ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dasar. Pola-pola itu mengandung imperatif normatif. Dimensi sarana (*polity*) mengandung dua pola normatif: *pertama*, tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas; struktur sosial ditata secara politik menurut prinsip keadilan. Maka asas kesamaan dan masalah siapa diuntungkan atau siapa dirugikan oleh hukum atau institusi tertentu relevan dibahas; *kedua*, kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai prinsip timbal-balik.

Terdapat tiga prinsip pola normatif dalam dimensi sarana politik, yaitu prinsip subsidiaritas, solidaritas, dan penerimaan pluralitas. Prinsip subsidiaritas mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Intervensi positif kelompok lebih besar atau negara terhadap kelompok lebih kecil hanya terjadi bila

²⁰ *Ibid..*

kelompok terakhir tidak mampu menyelesaikan dengan sarana dan kemampuan yang dimiliki. Negara hanya campur tangan sejauh membantu kesejahteraan umum dan keadilan distributif. Prinsip ini akan mengubah orientasi politik dari bias kepada negara menuju politik yang memihak warga negara. Tolok ukur keberhasilan politik ini ialah pemenuhan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi warga negara.

Sementara, prinsip solidaritas mengandaikan keterlibatan warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, bisa dalam pembentukan lembaga-lembaga bantuan, asosiasi-asosiasi kesejahteraan, koperasi, dan organisasi profesi. Solidaritas juga diterjemahkan dalam mekanisme distribusi kekayaan.

Namun, kedua prinsip itu mengandaikan penerimaan yang lain, yaitu pluralitas. Ini berarti dihargainya ruang kebebasan politik dan kesamaan. Ruang publik ini tercipta bila warga negara bertindak bersama dalam koordinasi melalui wicara dan persuasi, bukan dengan kekerasan dan intimidasi. Ruang publik menumbuhkan pemikiran kritis yang memberi kejelasan bahwa berpikir bersama tidak hanya berpikir bersama-sama, tetapi sungguh-sungguh menempatkan diri pada posisi orang lain.²¹

Dimensi ketiga etika politik adalah aksi politik (*politics*). Aksi politik ini merupakan hasil dari tindakan agensi politik dalam menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik disebut rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Ini mengandaikan kemampuan mempersepsi aneka kepentingan

²¹ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 204-207.

yang dipertaruhkan berdasar peta kekuatan politik yang ada. Disposisi kekuasaan ini membantu memperhitungkan dampak aksi politiknya. Menghindari kekerasan menjadi imperatif moral, penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis.²²

Sementara keutamaan dalam rasionalitas politik bermakna penguasaan diri dan keberanian memutuskan serta menghadapi risikonya. Etika identik dengan tindakan rasional dan bermakna. Politik menjadi bermakna karena memperhitungkan reaksi dari yang lain (*the others*): harapan, protes, kritik, persetujuan, penolakan. Keutamaan dalam rasionalitas politik akan semakin bermakna ketika tindakan politik didasari oleh belarasa dan keberpihakan kepada yang lemah atau korban.

Ringkasnya, etika politik memiliki tujuan untuk mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Menurut Paul Ricoeur, sebagaimana dikutip oleh Haryatmoko, etika politik mengandung tiga tuntutan, *pertama*, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; *kedua*, upaya memperluas lingkup kebebasan; dan *ketiga*, membangun institusi-institusi yang adil.²³

Tiga tuntutan tersebut saling terkait. Hidup baik bersama dan untuk orang lain tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan, yakni kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau

²² Haryatmoko, "Dimensi-dimensi Etika Politik...",

²³ Haryatmoko, "Etika Politik dan Civil Society" , dalam *Kompas*, 5 Juni 2000.

kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan kongkret kebebasan atau yang disebut sebagai *democratic liberties*: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

C. Etika Politik dan Demokratisasi di Indonesia

Berbagai penjelasan tentang nilai-nilai dan prinsip dasar etika politik serta dimensi politik di atas, memberikan gambaran secara ideal tentang bagaimana penyelenggaraan kehidupan publik mesti ditata. Begitu juga, prinsip dasar dan dimensi etika politik itu juga memberikan panduan yang ideal bagaimana mestinya pelaku politik mengarahkan tindakan politiknya, sehingga dapat mencapai rasionalitas politik yang berguna bagi kemaslahatan publik.²⁴

Namun, perilaku sebaliknya justru dapat kita temukan dalam tindakan politik di Indonesia. Sebuah perilaku politik yang mengabaikan baik nilai-nilai dasar etika politik, maupun dimensi etika politik. Sebagai contoh, partai-partai politik dan politisi kerapkali tidak memiliki visi dan tujuan politik yang jelas. Orientasi utama ketika memasuki kehidupan politik hanya untuk meraih kekuasaan dan mengakumulasi keuntungan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Tidak ada suatu *blue print* yang jelas tentang apa yang hendak diperjuang-kan atau direpresentasikan oleh partai politik atau politisi dalam tindakan politiknya. Kondisi semacam ini tentu mengarahkan tindakan politik di Indonesia pada

²⁴ *Ibid..*

pragmatisme yang akan mudah sekali terjerembab dalam penyelewengan kekuasaan (*power abuse*), irasionalitas politik dan amoralitas politik.

Jika dikaitkan dengan upaya untuk membangun institusi yang adil, etika politik sangat relevan untuk mewujudkan demokratisasi. Hal ini utamanya dapat ditempuh melalui upaya membangun *civil society*. Dalam pengertian generalnya, *civil society* merupakan ruang interaksi antara masyarakat dengan kekuatan politik dan ekonomi. Karena itu masyarakat sipil (*civil society*) dalam konteks ini dibedakan dengan masyarakat politik (*political society*), semisal partai politik, parlemen, organisasi politik, dan juga dibedakan dengan masyarakat ekonomi (*economic society*), seperti korporasi bisnis dan organisasi yang bergerak di bidang produksi dan distribusi. Pembedaan yang dibuat oleh Jean L. Cohen dan Andrew Arato ini dianggap penting sebab, kedudukan masyarakat sipil terhadap dua entitas yang lainnya dalam suatu interaksi sosial, ekonomi dan politik, relatif lebih lemah.²⁵

Karena itu, istilah *civil society* digunakan untuk merujuk ideal politik dimana ia merupakan “ruang publik” yang bebas dan sebagai arena kontestasi antara negara dan masyarakat. *Civil society* dalam konteks ini mempunyai peranan dan fungsi sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing*) terhadap masyarakat politik dan masyarakat ekonomi; juga sebagai kekuatan penengah (*intermediary institution*); dan juga menempati fungsi komplementatif (*partner*) masyarakat politik dan ekonomi dalam membangun demokrasi, kesejahteraan dan keadilan.

²⁵ Jean L.Cohen dan Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory* (Cambridge: MIT Press, 1993), hlm. iIx.

Dengan gambaran semacam ini maka pembangunan masyarakat madani atau masyarakat sipil berkaitan dengan demokratisasi sebuah negara.²⁶

²⁶ Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 116-117.

BAB IV

DIMENSI ETIS DALAM GAGASAN DAN PRAKTIK POLITIK

AKBAR TANDJUNG

Haryatmoko mengutip pendapat Bernhard Sutor ketika menjelaskan tentang persoalan etika politik yang tidak hanya berkenaan dengan masalah perilaku politikus saja. Perilaku politikus hanyalah salah satu dimensi etika politik. Lebih daripada itu, etika politik juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, Haryatmoko menegaskan bahwa etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu: tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri.¹

Dimensi tujuan dari etika politik terumuskan dalam komitmen yang teguh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan tingkat kehidupan yang damai yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan. Komitmen tersebut diupayakan perwujudannya lewat penerapan kebijakan-kebijakan umum dalam manajemen publik.

Di level institusi negara, dimensi tujuan etika politik ini mengandaikan bahwa para penyelenggara negara mestinya memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan negara yang diarahkan demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan tingkat kehidupan yang damai. Untuk tujuan tersebut, para penyelenggara negara harus merumuskan kebijakan umum yang jelas dalam hal prioritas, program, metode, dan pendasaran filosofisnya. Dimensi moralnya

¹ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 25.

terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas bagi kebijakan umum dan akuntabilitasnya. Tujuan yang terumuskan dengan jelas dalam kebijakan publik akan menunjukkan ketajaman visi penyelenggara negara dan kepeduliannya pada aspirasi masyarakat.

Rumusan kebijakan yang jelas ini sekaligus merupakan modal dalam rangka mewujudkan pertanggung-jawaban penyelenggaraan negara yang transparan. Dengan kata lain, atas dasar kebijakan umum ini, wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa melakukan evaluasi pelaksanaan, kinerja pemerintah dan menuntut pertanggung jawaban.²

Dimensi etika politik yang kedua adalah dimensi sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan (*polity*). Dimensi sarana ini bisa berupa sistem pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan bisa juga berupa prinsip-prinsip dasar yang mendasari institusi-institusi sosial. Ada dua pola normatif yang terkandung dalam dimensi ini. *Pertama*, tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas, subsidiaritas, dan penerimaan pluralitas. Di samping itu, struktur sosial mesti ditata secara politik menurut prinsip keadilan. *Kedua*, kekuatan-kekuatan politik mesti ditata sesuai dengan prinsip timbal-balik. Artinya, masing-masing kekuatan politik haruslah sepakat untuk mengkoordinasikan tindakan mereka dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. Etika politik pada dimensi sarana ini terejawantahkan pada perannya dalam menguji dan mengkritisi legitimitas keputusan-keputusan, institusi-institusi dan praktik-praktik politik yang berlaku. Oleh karena itu, ia berkenaan dengan

² *Ibid.*, hlm. 25-26.

persetujuan atau penolakan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik hidup bersama.³

Adapun dimensi etika politik yang ketiga adalah aksi politik (*politics*). Dalam dimensi yang ketiga ini, pelaku politik memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik. Pada dimensi aksi ini, etika identik dengan tindakan yang rasional dan bermakna. Politik mempunyai makna karena memperhitungkan reaksi yang lain: harapan, protes, kritik, persetujuan, penolakan. Tindakan politik disebut rasional bila pelaku politik mempunyai orientasi situasi dan mengerti seluk-beluk permasalahan politik yang dihadapinya. Ini mengandaikan kemampuan mempersepsi berbagai kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan peta kekuatan politik yang ada. Di level pelaku politik dituntut penguasaan manajemen konflik dan sikap menghindari kekerasan sebagai syarat aksi politik yang etis. Di samping itu, dituntut pula penguasaan diri dan keberanian memutuskan serta menghadapi resikonya. Makna etis akan semakin mendalam bila tindakan pelaku politik didasari oleh bela rasa dan keberpihakan kepada yang lemah.⁴

Tiga dimensi etika politik yang telah diterangkan di atas akan penulis jadikan sebagai kerangka untuk menjelaskan etika politik yang diterapkan Akbar Tandjung dalam praktik politiknya di panggung perpolitikan Indonesia.

³ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

A. Dimensi Tujuan Politik Akbar Tandjung

Pada dimensi tujuan politik, Akbar Tandjung berbicara soal visi Indonesia Sejahtera yang diimpikannya. Menurutnya, krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak masa transisi kekuasaan di era reformasi telah menempatkan negeri ini pada posisi yang sulit. Di mata internasional, Indonesia telah berubah menjadi negara yang tidak terlalu diperhitungkan, bahkan cenderung diabaikan, karena tidak kunjung bisa keluar dari krisis yang melandanya. Negeri ini terbelit oleh persoalan ekonomi dan politik yang parah, namun belum ada tanda-tanda penyelesaian yang konkret. Akibatnya, menurut Akbar, masa transisi berjalan lamban dan tidak jelas kapan akan berakhir. Apabila situasi ini dibiarkan, maka Indonesia akan terus menerus dihadapkan pada sebuah masa yang tidak menentu.⁵

Bagi Akbar, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi krisis multi dimensi yang melanda negeri ini dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang adil dan damai sentosa di negeri ini. “Indonesia Sejahtera”, demikian Akbar menyebut platform politiknya, haruslah menjadi visi pembangunan negeri ini pasca krisis multi dimensi. Visi Indonesia Sejahtera yang menjadi tujuan politik Akbar Tandjung itu akan penulis telusuri lebih mendalam di bagian berikut.

1. Visi Indonesia Sejahtera

Bagi Akbar, kesejahteraan bangsa Indonesia bukan hanya berkenaan dengan kemampuan untuk keluar dari krisis multi dimensi yang melanda, tetapi juga terkait dengan kesanggupan bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan di

⁵ Wawancara dengan Akbar Tandjung, Jakarta: 20 Desember 2007.

tiga bidang kehidupan; yakni bidang ekonomi, politik dan hukum, serta sosial dan budaya. Pembangunan di tiga bidang tersebut mesti menjadi prioritas kerja dan kebijakan umum penyelenggara negara di masa terdekat. Dibutuhkan strategi membangun Indonesia sejahtera secara bertahap, dan diperlukan ketajaman untuk memilih hal-hal yang lebih mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu dengan skala prioritas yang terukur secara obyektif.

Akbar mendasarkan visi mewujudkan kesejahteraan Indonesia di tiga bidang kehidupan tersebut atas analisanya terhadap persoalan-persoalan mendesak yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Menurut Akbar, setidaknya ada sembilan pusaran persoalan yang mendesak penyelenggara negara untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program konkret.

Pertama, persoalan pemulihan ekonomi Indonesia setelah dihantam oleh badai krisis ekonomi dan krisis moneter pada satu dekade silam. Menurut Akbar, langkah-langkah dan proses pemulihan ekonomi Indonesia selama satu dekade ini tampak tidak dirancang dan dilakukan secara sistematis. Program pemulihan ekonomi Indonesia tidak dilakukan berdasarkan prioritas kerja yang layak dan dapat dipercaya, karena hanya didasarkan atas basis tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, namun mengabaikan peran investasi dan perdagangan internasional. Komoditi ekspor dan impor Indonesia masih cukup rendah dan tidak menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Kondisi ini dipersulit oleh laju ekonomi dunia yang melambat, persoalan stabilitas makro di dalam negeri, dan tingkat kepastian hukum yang cukup rendah. Semua itu membuat laju

investasi dan tingkat penanaman modal asing dan domestik mengalami perlambatan.⁶

Menurut Akbar, proses pemulihan ekonomi yang mengandalkan sektor konsumsi ini tidak akan mampu bertahan dari terpaan badi krisis ekonomi, apalagi untuk diharapkan mampu meningkatkan produktifitas ekonomi di dalam negeri. Penguatan sektor konsumsi hanya akan menguntungkan produsen luar negeri dan tidak akan mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang kian bertambah di dalam negeri. Akbar memandang bahwa penguatan sektor konsumsi tidak mengarah pada ekonomi produktif, karena tidak menghasilkan aktivitas investasi dan produksi di dalam negeri yang menghasilkan nilai tambah positif demi melipat-gandakan pendapatan masyarakat Indonesia.⁷

Akbar menyadari bahwa penguatan investasi dan produksi sebagai arah pemulihan ekonomi Indonesia tidaklah berdiri sendiri. Ia berhubungan erat dengan kondisi ekonomi makro, stabilitas politik, keamanan, serta kepastian hukum. Di samping itu, rendahnya aktivitas produksi juga merupakan konsekuensi logis dari tidak bergeraknya fungsi intermediasi perbankan dalam menjalankan sektor riil. Kondisi ini menjadi semakin pelik tatkala dalam perannya sebagai lembaga mediator aliran dana, bank sentral tak kunjung menurunkan tingkat suku bunga. Akibatnya, aliran dana dari pihak masyarakat yang memiliki kelebihan kepada pihak yang membutuhkan dana segar menjadi macet. Kondisi ini diperburuk dengan persoalan manajemen mikro, kecukupan modal, penyelesaian kredit macet, restrukturisasi, dan rekapitalisasi yang tengah dihadapi

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

oleh sektor perbankan di negeri ini. Akhirnya, bank sentral gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dana di kalangan masyarakat.⁸

Kedua, persoalan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang belum membaik. Ditinjau dari segi kuantitas, laju pemulihan ekonomi sepanjang satu dekade terakhir belum mampu menciptakan lapangan kerja dan tingkat penghidupan yang layak bagi warga negara yang dikenal kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia ini. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan di setiap tahunnya berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, terjadilah pengangguran di mana-mana. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat ini telah pula menjadi ancaman bagi pembentukan karakter manusia Indonesia. Terlebih lagi ketika manusia Indonesia yang menganggur pada umumnya adalah kalangan usia muda yang seharusnya menjadi tulang punggung dan harapan bangsa di masa mendatang.

Sementara ditinjau dari segi kualitas, tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih cukup rendah di hampir seluruh bidang. Index pembangunan manusia (*human development index*) hanya berada pada urutan ke 110 dunia. Index ini adalah peringkat yang nyaris paling rendah di Asia Tenggara. Angka buta aksara, terutama di tingkat pedesaan, kaum wanita dan di daerah-daerah pelosok masih cukup tinggi. Demikian pula, kualitas pendidikan masih amat memprihatinkan karena buruknya manajemen pendidikan dan rendahnya proporsi guru yang layak untuk mengajar. Mahalnya biaya pendidikan

⁸ *Ibid.*

membuat dunia pendidikan semakin sulit dijangkau oleh kalangan masyarakat yang mestinya menjadi sasaran program peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Ditambah lagi dengan kualitas kesehatan dan tingkat kecukupan gizi masyarakat yang juga sama buruknya dengan tingkat pendidikan yang mereka terima. Di berbagai daerah di negeri ini, masih ditemukan kasus tingginya angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, angka kesakitan dan wabah penyakit menular. Semua itu belum dapat ditanggulangi dengan baik, sehingga memperburuk tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di atas.⁹

Ketiga, persoalan kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa yang merosot secara drastis sepanjang satu dekade terakhir ini. Menurut Akbar, persoalan ini tidak dapat dilihat dari soal independensi ekonomi dan tingkat ketergantungan Indonesia kepada pihak asing dalam mengelola perekonomian negara. Ketergantungan kepada utang luar negeri kadang berimplikasi negatif pada pendiktean pihak asing atas kebijakan dalam negeri Indonesia. Dari kenyataan tersebut, posisi Indonesia dalam peta perundingan dan diplomasi internasional tidak lebih dari sekadar sebagai pengikut yang tidak memiliki kuasa untuk menentukan nasib di negeri sendiri.

Rendahnya tingkat kedaulatan ekonomi Indonesia ini juga disebabkan oleh kondisi perekonomian bangsa ini yang baru mampu menghasilkan produk dengan kualitas rendah, atau maksimal menengah. Tentu saja, nilai tambah industri dan kontribusi pada pembentukan cadangan devisa nasional darinya adalah rendah

⁹ *Ibid.*

juga. Di Indonesia, menurut Akbar, pangsa produk yang menggunakan tingkat penggunaan teknologi maju pada industri manufaktur masih rendah. Produk-produk impor justru membanjiri pasar-pasar di negeri ini. Tingkat kepercayaan konsumen kepada produk dalam negeri juga masih sangat rendah. Produk impor lebih banyak diminati ketimbang produk yang dihasilkan dari industri dalam negeri. Semua itu semakin memperburuk tingkat ketergantungan Indonesia pada kemajuan negara-negara lain, dan juga berakibat negatif terhadap tingkat kedaulatan ekonomi bangsa ini.

Di sisi lain, rendahnya kemandirian bangsa juga dipengaruhi oleh buruknya dukungan politik dan rendahnya kualitas riset dan pengembangan di hampir semua lapisan masyarakat, baik di kalangan dunia usaha, lembaga riset, perguruan tinggi, maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Perkembangan dunia global dewasa ini menuntut keunggulan riset dan teknologi. Keberhasilan Indonesia dalam kancah perdagangan bebas dan diplomasi ekonomi dan politik tidak akan dapat tercapai jika Indonesia tidak memiliki modal riset dan teknologi yang kuat, tanpa bergantung lagi pada kemajuan pihak asing. Sebaliknya, sikap pasif dan ketergantungan kepada informasi dan perkembangan teknologi maju hanya akan mejadikan bangsa ini sebagai sasaran empuk yang tak berdaya dalam konteks persaingan ekonomi global. Sikap yang demikian itu tidak akan mampu mengubah keadaan Indonesia menjadi lebih aktif, dinamis, dan berdaulat di mata internasional.¹⁰

¹⁰ *Ibid..*

Keempat, persoalan kualitas lingkungan hidup dan pertanahan yang makin menurun serta buruknya penegakan hukum dalam hal kepemilikan atas tanah di Indonesia. Akbar memandang bahwa dampak aktivitas ekonomi yang tidak memperhitungkan aspek keberlanjutan sumber daya alam di jangka panjang telah meningkatkan laju kerusakan hutan sampai 1,6 juta hektar per tahun. Persoalan-persoalan penebangan hutan, pencurian sumber daya laut, penangkapan ikan, dan penambangan sumber daya mineral yang semuanya dilakukan secara illegal harusnya menjadi permasalahan serius yang harus ditangani secara seksama oleh pemerintah. Kegagalan menangani hal tersebut pasti juga akan turut merusak seluruh sistem insentif dan kebijakan pendukung lain yang terkait dengannya.

Menurut Akbar, persoalan memburuknya kualitas lingkungan hidup dan pertanahan ini berhubungan dengan lemahnya kelembagaan dan pengakuan atas hak kepemilikan warga negara untuk memanfaatkan setiap jengkal tanahnya demi kesejahteraan bersama. Persoalan agraria di negeri ini selalu ditangani secara konflikual yang pada gilirannya justru menjadi sumber baru bagi instabilitas politik dan hukum. Hukum agraria di Indonesia masih belum akomodatif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan kesejahteraan masyarakat. Persoalan ini menuntut pembacaan kembali terhadap kondisi agraria di negeri ini dengan prinsip untuk mewujudkan kesejahteraan bersama anak bangsa ini, dan bukan untuk dibiarkan dicuri kekayaan agrarianya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹¹

¹¹ *Ibid.*

Kelima, adalah persoalan keamanan dan rasa aman yang kian lama kian menjadi barang mahal di negeri ini. Pada satu dekade terakhir, angka tindak kejahatan berkembang semakin tinggi. Pertentangan antar kelompok dalam masyarakat juga semakin mudah meletup. Terorisme menjadi isu umum di kalangan masyarakat. Secara umum, menurut Akbar, persoalan keamanan dan merosotnya rasa aman ini berpengaruh pada terganggunya proses demokrasi dan telah pula ikut memperburuk tingkat penanaman modal di dalam negeri.¹²

Keenam, persoalan penegakan hukum dan HAM yang masih lemah. Menurut Akbar, persoalan ini disebabkan oleh ketidak-mampuan perangkat hukum yang ada dalam menanggulangi berbagai pelanggaran hukum, serta ketidak mampuan pelaku atau institusi yang ada saat ini untuk menjalankan langkah penegakan hukum yang diperlukan. Bagi Akbar, dua bentuk penegakan mekanisme hukum dan HAM itu harus sama-sama dijalankan secara beriringan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, penegakan hukum dan HAM di Indonesia mutlak harus diwujudkan. Pada prinsipnya, seluruh warga bangsa berdiri sederajat di muka hukum dan harus taat pada segala aturan hukum yang ada.¹³

Ketujuh, adalah soal demokrasi, kemandirian daerah dan integrasi bangsa. Akbar mengatakan bahwa perjalanan demokrasi selama era reformasi ini justru dipenuhi dengan fenomena-fenomena kekerasan, konflik sosial, teror dan persaingan yang kontra produktif antar elit politik di tingkat nasional dan daerah. Di tengah kondisi yang demikian itu, aspirasi rakyat masih sering diabaikan,

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

bahkan dijadikan komoditas politik untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Demokrasi dan reformasi hanya memunculkan kehadiran berbagai kekuatan politik yang justru mengabaikan pentingnya sistem politik yang efektif untuk menopang jalannya proses demokrasi.

Di pihak lain, cita-cita demokrasi yang semakin meluas yang diterapkan dalam skema otonomi daerah demi cita-cita terwujudnya kemandirian daerah justru menjelma jadi peningkatan kewenangan daerah yang hampa dari visi besar untuk mengisi integrasi bangsa dan keutuhan negara Indonesia. Otonomi daerah seringkali disalah artikan sebagai kebebasan yang penuh bagi pemerintah daerah untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa terikat lagi dengan keutuhan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Kemandirian daerah juga masih terkendala oleh keterbatasan dan keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia di masing-masing daerah. Terlebih lagi, lemahnya kerjasama antara pusat dan daerah tidak jarang menghambat proses pembangunan di daerah dan koordinasi antara daerah otonom. Kualitas kerja birokrasi dan legislasi di daerah masih lemah dan cenderung tidak efisien. Akibat dari persoalan tersebut, masyarakat kembali dihadapkan pada berbagai beban baru pasca era otonomi daerah yang justru menghambat kemajuan.

Persoalan demokrasi yang timpang dan pelaksanaan otonomi daerah yang tanpa visi bersama, berimpliksi pada munculnya ancaman distintegrasi bangsa yang bisa menjadi persoalan serius di kemudian hari. Ancaman disintegrasi ini akan semakin menguat ketika dipicu oleh munculnya konflik sosial, gerakan separatis, dan belum terciptanya pemerataan pembangunan secara adil.

Disintegrasi bangsa tentu saja akan memudarkan semangat nasionalisme Indonesia sebagai bangsa yang satu. Perasaan sebagai satu bangsa dan tingkat kepedulian di antara warga masyarakat akan menjadi terkikis, dan lambat laun dikhawatirkan bisa pupus sama sekali.¹⁴

Kedelapan, persoalan keharmonisan dan kerukunan sosial yang juga mengalami kemerosotan. Persoalan ini, menurut Akbar, terkait erat dengan masalah-masalah pelik yang mengiringi krisis ekonomi yang melanda Indonesia satu dekade lalu. Meningkatnya problem sosial membuat keharmonisan dan kerukunan sosial mudah terganggu. Perbedaan suku bangsa, etnisitas, bahasa, agama, pandangan politik, dan ragam kelompok sosial yang mestinya menjadi kekayaan bersama, justru menjadi penghalang bagi terwujudnya keharmonisan dan kerukunan sosial. Keharmonisan menjadi terganggu karena di berbagai daerah seringkali muncul perbedaan dan bahkan konfrontasi yang mengedepankan perbedaan-perbedaan itu.

Selain itu, kesenjangan ekonomi yang berlangsung selama ini di sebagian wilayah Indonesia tidak jarang pula menimbulkan ketimpangan sosial. Hal ini diperburuk oleh lemahnya kemampuan kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal dalam mengelola konflik. Akibatnya, persatuan antar sesama warga bangsa mengalami krisis. Solidaritas dan persaudaraan yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia menjadi tumpul.¹⁵

Kesembilan, masalah kaum perempuan di Indonesia yang masih didera oleh persoalan pelik, baik karena posisinya sebagai perempuan maupun karena

¹⁴ *Ibid..*

¹⁵ *Ibid..*

sikap dan cara pandang masyarakat yang tidak adil terhadapnya. Pada umumnya, perempuan Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Partisipasi kaum perempuan Indonesia di bidang pendidikan dari sekolah dasar sampai tingkat tinggi masih amat rendah, jika diukur dengan standar Asia Tenggara. Tercatat bahwa 39 persen perempuan tidak mengenyam bangku sekolah. Hanya 13 persen saja yang mampu lulus sekolah lanjutan pertama (SLTP), dan kurang dari 5 persen yang berhasil lulus perguruan tinggi.

Selain soal pendidikan, perempuan Indonesia juga terbelakang dalam hal kesehatan. Dewasa ini terlihat bahwa tingkat kesehatan ibu dan anak Indonesia amat memprihatinkan. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia yang berjumlah 31 per 1000 kelahiran merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara.

Persoalan lain yang berkenaan dengan perempuan Indonesia ini adalah soal tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di dalam rumah tangga, di lingkungan kerja, maupun di tempat-tempat umum masih tinggi. Kondisi ini tidak hanya ditemukan di wilayah perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Kaum perempuan Indonesia masih terbelakang dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah, dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Mereka juga terpinggirkan dalam hal partisipasi politik dan keberpihakan kebijakan-kebijakan pemerintah di negeri ini.¹⁶

Menurut Akbar, sembilan pusaran persoalan di atas mendesak untuk dicarikan penyelesaiannya. Pengabaian terhadap persoalan-persoalan tersebut, bukan saja menjauhkan bangsa Indonesia dari kesejahteraan yang dicita-citakan,

¹⁶ *Ibid..*

tetapi juga akan semakin memperburuk kondisi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, bagi Akbar, platform Indonesia Sejahtera mestinya dirumuskan berdasarkan pembacaan dan analisa yang seksama terhadap persoalan-persoalan di atas.

2. Pemberdayaan Masyarakat Madani

Selain memiliki visi Indonesia Sejahtera yang didasarkan pada analisa atas persoalan-persoalan konkret yang dihadapi oleh bangsa ini sepanjang satu dekade terakhir ini, Akbar juga menganggarkan tentang pemberdayaan masyarakat sipil dalam konteks kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Bagi Akbar, kontrol terhadap kekuasaan mutlak diperlukan. Ia mengatakan:

Kalau kita cermati dengan seksama, kelemahan sistem penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru terletak pada tidak adanya kontrol atau pengawasan, sehingga kekuasaan terpusat pada satu tangan, atau satu orang, yakni pada presiden Soeharto ... Karena kekuasaan itu tidak bisa dikontrol dan diawasi oleh rakyat, maka yang terjadi bukanlah kemakmuran dan kesejahteraan, bukan pula keadilan dan kebenaran yang ditegakkan, melainkan kemiskinan dan kesenjangan yang dirasakan oleh rakyat. Ini semua terjadi lantaran kekuasaan berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol dan mengawasi.¹⁷

Bertolak dari pandangannya di atas, Akbar berpendapat bahwa sistem penyelenggaraan negara harus ditata dan dibangun secara demokratis dan konstitusional. Untuk menuju ke arah itu, menurutnya, beberapa perubahan mendasar memang telah dilakukan. Seperti ia sebutkan, beberapa perubahan itu meliputi pemisahan secara jelas antara fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penempatan MPR benar-benar sebagai lembaga tertinggi negara, pembatasan

¹⁷ Akbar Tandjung, “Urgensi Pergerakan Mahasiswa dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah”, *Makalah*, disampaikan pada Kongres I Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia [ILMISPI], (Bandar Lampung, 17 April 2000), hlm. 4.

kekuasaan presiden, penegakan mekanisme *check and balances*, dan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas.¹⁸

Akbar menunjukkan minat khusus pada hal yang disebut terakhir tadi. Ia adalah sosok politikus yang punya perhatian khusus terhadap perumusan dan penerapan mekanisme *check and balances*. Hampir dalam setiap kesempatan pembicaraan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, Akbar selalu menekankan pentingnya mekanisme tersebut. Menurutnya, realitas politik memperlihatkan bahwa penerapan mekanisme itu tidak bisa dilakukan oleh partai politik saja. Partai politik punya keterbatasan-keterbatasan yang inheren di dalam dirinya. Ia hanya mampu menjalankan fungsi-fungsi kontrol yang berbobot politis dan ada dalam aturan konstitusi. Di luar itu, partai politik harus berbagi tempat dengan kekuatan publik yang lain. Mekanisme *check and balances* juga harus dijalankan oleh kantong-kantong kekuatan publik, seperti kalangan agamawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, media massa (pers), dan kalangan akademisi serta mahasiswa.

Menurut M. Deden Ridwan dan M. Muhamadirin, pandangan Akbar tentang pentingnya mekanisme *check and balances* ini mengandung makna pemberdayaan yang disemangati oleh ide-ide *civil society* (masyarakat sipil; masyarakat madani). Sebagaimana dimaklumi, pada tahun 1990-an, wacana tentang masyarakat sipil ini telah menjadi diskursus yang menonjol di kalangan intelektual Indonesia. Sementara di dunia Barat, diskursus masyarakat sipil sudah ramai dibicarakan sejak tahun 1970-an. Maraknya kalangan yang meminati diskursus masyarakat

¹⁸ *Ibid..*

sipil ini di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi otoritarianisme rezim Orde Baru dan andil para intelektual Indonesia yang kritis yang saat itu bernaung di berbagai LSM dan di berbagai perguruan tinggi di negeri ini.

Pandangan Akbar tentang pemberdayaan masyarakat madani atau masyarakat sipil hendaknya tidak dipahami sebagai kekuatan yang berdiri pada posisi *vis a vis* negara. Pemberdayaan masyarakat madani bukan berarti melawan atau mengalahkan kekuasaan negara. Pada kenyataannya, hampir tidak tersisa ruang untuk mengatakan bahwa masyarakat tidak butuh negara, karena sesungguhnya masyarakat dan negara adalah mitra yang punya hubungan dialektis. Masyarakat madani bukanlah musuh negara yang berpretensi untuk mencampakkan signifikansi negara, tetapi justru akan lahir atau kokoh selama negara dalam keadaan stabil. Di dalam entitas negara, ada institusi-institusi hukum yang justru menjadi salah satu pilar fundamental kekuatan masyarakat madani. Bagi Akbar, pemberdayaan masyarakat madani berarti menguatkan kontrol publik yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang sejajar dengan kekuasaan yang dimiliki negara. Dalam posisi yang sejajar ini, masyarakat akan memiliki posisi tawar terhadap kebijakan-kebijakan yang dirumuskan negara.

Salah satu kekuatan masyarakat madani yang diharapkan Akbar akan mampu mengimbangi kekuatan negara adalah kekuatan mahasiswa. Akbar memandang bahwa sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia dapat disebut paralel dengan sejarah perjuangan bangsa ini. Akbar menegaskan bahwa tidak ada satu pun puncak-puncak sejarah perjalanan bangsa yang tidak lahir dari kancah perjuangan mahasiswa dan kaum muda pada umumnya, baik di era kemerdekaan,

revolusi fisik, peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, maupun di era reformasi. Semua itu menegaskan bahwa kekuatan mahasiswa masih bisa diharapkan sebagai garda depan pembaharuan politik dan kekuatan utama masyarakat madani di Indonesia.¹⁹ Akbar menambahkan:

Dalam konteks dan perspektif ketiadaan “oposisi” dalam format politik baru kita itu –meski saya sedikit kurang sepakat dengan terminologi ini– maka peran dan fungsi mahasiswa sebagai kekuatan moral, kalangan perguruan tinggi, lembaga-lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta lembaga pers, justru menjadi sangat penting, dan karena itu harus dipentingkan. Posisi lembaga-lembaga semacam ini, terutama peran mahasiswa sebagai kekuatan moral, sungguh sangat strategis. Dengan adanya kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam masyarakat seperti yang saya sebutkan itu, maka kekuatan pemerintahan akan ada yang mengimbanginya.²⁰

Menurut Akbar, fungsi kontrol atau pengawasan dari mahasiswa sebaiknya tidak hanya ditujukan kepada kebijakan pemerintah, akan tetapi juga kepada kinerja lembaga-lembaga yang lain, baik MPR, DPR, MA, maupun partai politik. Akbar juga menekankan pentingnya pergerakan mahasiswa untuk memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan pemerintahan di daerah-daerah, berdasarkan kerjasama kantong-kantong kekuatan mahasiswa di berbagai daerah. Hal ini karena timbulnya kekhawatiran banyak kalangan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang rawan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta maraknya politik uang yang bisa menjadi persoalan serius bagi bangsa ini.

Kunci kekuatan moral mahasiswa bagi Akbar bukan terletak pada kuantitas massa atau suara keras yang berbau politis, melainkan pada ide dan daya

¹⁹ *Ibid.*, hlm 8.

²⁰ Akbar Tandjung, “Fungsi Kontrol Gerakan Moral Mahasiswa Pasca Sidang Umum MPR 1999”, *Makalah*, disampaikan pada Dies Natalis LXXI PMKRI Cabang DKI Jakarta “Sanctus Robertus Bellarminus”, (Jakarta 6 November 1999), hlm. 10.

kritik yang konstruktif.²¹ Gerakan mahasiswa hendaknya konsisten dalam menanamkan kepercayaan yang luar biasa pada daya rasional dan kreativitas. Sebagai bagian dari gerakan moral, mahasiswa harus mampu mengobarkan semangat pengorbanan. Para pelakunya pun wajib punya kemauan dan stamina yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah sosial-politik. Sebagai simbol kekuatan negara, gerakan mahasiswa punya agenda ganda; yakni melakukan kontrol pada negara dan mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai di masyarakat.

Selaras dengan semangat gerakan moral di atas, mahasiswa, menurut Akbar, tidak dibenarkan terlibat dalam pertarungan (konflik) elite politik. Bila itu terjadi, mahasiswa akan otomatis hanya menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu saja. Mahasiswa hendaknya berpihak pada nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal. Gerakan moral mahasiswa harus senantiasa memperjuangkan perbaikan dalam pelbagai sektor kehidupan negara dan masyarakat tanpa henti. Bila konsisten dengan visi gerakannya, maka yang ada dalam benak mahasiswa hanyalah soal bagaimana mengantarkan bangsa ini ke arah terwujudnya sistem politik rasional, adil, dan demokratis, tidak peduli pada siapa dan golongan mana yang berkuasa. Sebagai gerakan moral, mahasiswa hendaknya lebih mementingkan kepentingan rakyat secara menyeluruh ketimbang memihak pada kepentingan satu kelompok tertentu, sehingga hanya akan memandulkan daya kritisnya terhadap kelompok tersebut.

²¹ M. Deden Ridwan, “Mahasiswa dan ‘Cek Kosong’”, *Kompas*, 6 Mei 1999, hlm. 5-6.

Selain memandang signifikansi gerakan mahasiswa sebagai kekuatan masyarakat madani, Akbar juga memandang kekuatan kontrol yang bisa dilakukan oleh pers secara bebas dan profesional sebagai pilar yang harus diperjuangkan dalam pemberdayaan masyarakat madani. Pers bahkan memiliki latar belakang sejarah sebagai elemen kekuatan publik yang cukup dominan. Pers telah tumbuh sebagai media akses informasi bagi publik yang secara inheren memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengendalikan opini publik terhadap penyelenggaraan negara. Di mata Akbar, pers memiliki peran signifikan sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Ia mengatakan:

Dunia pers sekarang ini telah diberikan kebebasan yang seluas-luasnya di satu sisi, namun di sisi lain kita semua mengharapkan diterapkannya etika moral di dalam kegiatan jurnalistik. Kita tidak menghendaki munculnya berita-berita yang bersifat insinuatif ataupun berita-berita yang dapat dikategorikan “yellow paper”, yang bersifat profokatif dan memutar-balikkan fakta yang hanya mengejar oplah untuk mendapatkan profit dengan meninggalkan tata kepatutan dalam nilai-nilai jurnalistiknya.²²

Akbar melanjutkan:

Kita sangat menyadari bahwa pemberitaan-pemberitaan yang dibuat oleh para insan pers ini akan menciptakan suatu opini di masyarakat yang sekarang ini sedang memiliki gelora atau semangat tinggi dalam mewujudkan reformasi. Bahkan seringkali terjadi “trial by the press” yang tidak menguntungkan bagi pembentukan supremasi hukum yang kita tegakkan.²³

Sebagai salah satu pilar kekuatan masyarakat madani, Akbar mengharapkan insan-insan pers dapat menjadi jurnalis profesional yang santun, dalam arti santun berberita, santun berwawancara, dan santun berpenampilan. Insan pers

²² Akbar Tandjung, “Sambutan Ketua DPR-RI pada Acara Orientasi/Pembekalan Wartawan Koordinatoriat DPR-RI”, *Makalah*, Jakarta, 7-9 April 2000, hlm. 4. *Yellow Paper* (koran kuning) pernah marak dan pertama kali disebut-sebut ketika komunisme masih menjadi ideologi yang diizinkan di Indonesia. Media yang memuat berita gaya koran kuning ini sebenarnya sangat sukar untuk didefinisikan sebagai media sesungguhnya. Saat ini sebutan itu kurang begitu populer meskipun ada media yang memuat berita dengan kategori seperti itu.

²³ *Ibid..*

hendaknya tidak menjadi kelompok partisan baru yang menghamba pada kelompok kepentingan tertentu. Nilai berita yang diterbitkan oleh pers diharapkan Akbar juga memihak pada kepentingan kemajuan masyarakat secara menyeluruh.

B. Dimensi Sarana Politik Akbar Tandjung

Untuk mewujudkan tujuan politik yang diangangkan Akbar di atas, yang semuanya berdasarkan pada penghargaan atas prinsip-prinsip keadilan, pluralitas, dan kebebasan, ia menggariskan beberapa sarana yang menurutnya akan mampu mengantarkan bangsa ini pada kesejahteraan yang dicita-citakan. Dimensi sarana ini dijelaskan Akbar baik dalam bentuknya sebagai prinsip-prinsip dasar yang mendasari institusi sosial, maupun sebagai pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dalam bentuk program-program konkret yang mendesak untuk dilaksanakan.

1. Strategi Membangun Indonesia Sejahtera

Bagi Akbar, untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia, diperlukan kerangka prioritas bagi kebijakan-kebijakan yang hendak dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Kerangka prioritas itu berupa rumusan strategis tentang langkah-langkah membangun Indonesia sejahtera lewat tiga langkah sukses pembangunan ekonomi, politik-hukum, dan sosial-budaya. Agenda-agenda penting yang menjadi prioritas dijelaskan oleh Akbar sebagai berikut.

a. Sukses Pembangunan Ekonomi

Sukses pembangunan ekonomi bagi Akbar mencakup empat prioritas utama, yaitu: *pertama*, percepatan pemulihan ekonomi; *kedua*, peningkatan

kesejahteraan dan sumber daya manusia; *ketiga*, pemantapan kedaulatan dan kemandirian bangsa; dan *keempat*, perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pertanahan.

Pertama, berkenaan dengan strategi percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, menurut Akbar, langkah yang paling memungkinkan saat ini adalah lewat dua sekaligus. Di satu sisi, investasi dan aktivitas produksi domestik perlu ditingkatkan. Sementara di sisi lain, sektor riil perlu dikembangkan berdasarkan paradigma ekonomi berbasis sumber daya (*resource-based economy*).²⁴

Peningkatan laju investasi dan produksi domestik diharapkan akan mampu menyerap angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Untuk kepentingan itu, segala bentuk hambatan struktural yang menghalangi proses peningkatan laju investasi ini perlu dihilangkan. Sebaliknya, kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif perlu ditegakkan untuk menjamin proses tersebut. Demikian pula, menurut Akbar, sektor perbankan perlu dibenahi agar lebih mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi aliran modal di tengah masyarakat. Laju investasi harus ditopang pula dengan perkembangan institusi pasar yang mengimbangi langkah perkembangan pasar global yang semakin terbuka.

Di sisi lain, Akbar juga menegaskan perlunya pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya (*resource-based economy*), dalam rangka mempercepat perkembangan sektor riil. Implementasi paradigma ekonomi

²⁴ Wawancara dengan Akbar Tandjung, Jakarta: 31 Mei 2008.

berbasis sumber daya ini memerlukan langkah sinergis antara keterbukaan ekonomi, persaingan usaha, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan kata lain, antara sektor pertanian dan industri, pedesaan dan perkotaan, tradisional dan modern, usaha kecil menengah (UKM) dan usaha besar hendaknya berjalan secara beriringan dan saling berkolaborasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi bangsa.

Untuk menopang terwujudnya langkah sinergis di atas, kebijakan ekonomi perlu lebih difokuskan pada peningkatan nilai tambah bagi sektor industri dan perdagangan. Strategi yang dibutuhkan adalah kombinasi antara langkah afirmatif dan insentif yang berbasis pada pasar. Langkah ini dipandang efisien untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, dalam skala waktu yang bersamaan, sektor agribisnis, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan perlu memperoleh perhatian ekstra dan dijadikan andalan ekonomi bangsa pada jangka pendek dan menengah. Hal ini karena sektor-sektor ekonomi ini adalah yang paling potensial dalam memacu roda-roda perekonomian di pedesaan dan perkotaan. Bagi Akbar, langkah sinergis antar berbagai sektor ekonomi tersebut bukan dilakukan berdasarkan kemitraan gaya lama yang hanya menguntungkan para pengusaha besar, melainkan dalam rangka peningkatan keterkaitan bidang-bidang ekonomi yang saling terpisah demi meningkatkan taraf hidup petani, pengusaha kecil dan para pelaku ekonomi kecil yang selama ini terpinggirkan.²⁵

²⁵ *Ibid..*

Kedua, tentang peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia, bagi Akbar, diperlukan strategi ekonomi yang berbasis pada peningkatan kesempatan kerja (*employment-based economy*). Dalam hal ini, strategi sukses ekonomi yang dilaksanakan selama ini perlu dikonversi ke arah strategi pemulihan ekonomi yang memperhatikan dan memperluas kesempatan kerja secara signifikan. Untuk langkah awal strategi ini, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana pembangunan, serta infrastruktur keras dan lunak guna memicu perputaran roda ekonomi. Pada tahap berikutnya, pemerintah perlu menjamin keikutsertaan pihak swasta dan masyarakat secara luas dalam menjaga dan mempercepat perputaran roda ekonomi yang telah bergulir tersebut.²⁶

Akbar menilai bahwa penanggulangan yang telah dilakukan selama ini, yakni berupa program-program massal untuk mengatasi problem pengangguran dan kesejahteraan yang minim, sebagai langkah-langkah yang masih jauh dari hasil yang diharapkan. Lebih dari upaya tersebut, diperlukan juga langkah-langkah yang lebih terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kualitas pekerja dan sumber daya lain, dengan cara menyediakan dan memperbaiki lembaga-lembaga pelatihan kerja yang sesuai dengan standar kompetensi. Di titik ini, Akbar memandang lembaga-lembaga pendidikan kejuruan sebagai institusi yang dibutuhkan untuk menjembatani tingkat permintaan tenaga kerja dan perbaikan kualitas masyarakat dalam partisipasi pendidikan. Strategi ini akan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, peningkatan daya saing

²⁶ *Ibid.*

dunia usaha dan produk Indonesia, serta stimulasi partisipasi masyarakat di dunia pendidikan kejuruan.

Di samping itu, menurut Akbar, upaya menyerap angkatan kerja potensial yang akan menggerakkan pendapatan di berbagai lapisan masyarakat dapat pula dilakukan lewat langkah-langkah sinergis pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil menengah, pengembangan sektor ekonomi yang berbasis di pedesaan, serta peningkatan keterkaitan antara perkembangan roda ekonomi di pedesaan dan perkotaan, pertanian dan industri, usaha kecil menengah dan usaha besar. Jika masing-masing sektor perekonomian tersebut saling berkolaborasi, maka lapangan kerja bagi masyarakat akan semakin terbuka karena inisiatif-insiatif ekonomi akan muncul dari langkah kolaboratif tersebut. Modal usaha pun tidak lagi terpusat pada sektor ekonomi yang lebih besar, melainkan juga mengalir dan dapat menstimulus perkembangan sektor ekonomi berskala kecil.²⁷

Ketiga, berkenaan dengan kedaulatan dan kemandirian bangsa, Akbar berpendapat bahwa hal itu perlu ditempuh lewat langkah-langkah nyata bersama bangsa-bangsa lain untuk senantiasa mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Menurutnya, bangsa Indonesia secara bersama-sama perlu menjaga martabat bangsa, dengan meletakkan kedaulatan bangsa dan negara di atas yang lain. Penegasan atas sikap sebagai bangsa yang berdaulat memerlukan kegiatan yang nyata, karena upaya ini memerlukan kewaspadaan dan sikap tegas demi kemartabatan bangsa di tengah tata pergaulan dunia. Bangsa Indonesia harus

²⁷ *Ibid..*

berani bersikap tegas dan menolak segala bentuk apapun yang merendahkan martabat dan kemandirian bangsa.²⁸

Di samping itu, menurut Akbar, bangsa Indonesia juga perlu menghargai pihak asing dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Demikian pula sebaliknya. Negara lain tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Kerjasama dengan pihak asing adalah wajar, sejauh tidak mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan nasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu lebih cerdik dalam memanfaatkan jaringan kerja dan forum-forum kerjasama di segala bidang.

Dalam hal diplomasi ekonomi-politik, Indonesia hendaknya tidak membatasi diri pada lingkup regional, tetapi juga pada lingkup internasional. Hal itu dapat dilakukan dengan mengambil peran yang lebih besar di tingkat Asia Tenggara, hingga instrumen kerjasama ekonomi dan keuangan yang berhubungan, seperti AFTA, APEC, WTO, dan Organisasi Konferensi Islam sedunia (OKI). Indonesia harus lebih pro-aktif dalam skema mundial dan global, paling tidak menunjukkan sikap politiknya dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal inilah, menurut Akbar, yang perlu diyakini dan ditindak-lanjuti bahwa persaingan atau kompetisi yang sehat dapat menghasilkan bangsa yang tangguh, mandiri dan berbicara lebih signifikan pada arena global.²⁹

Keempat, terkait dengan persoalan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pertanahan, Akbar berpendapat bahwa perbaikan tersebut hendaknya diupayakan dengan berbagai cara yang terukur. Menurutnya, pada jangka pendek

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

perlu dilakukan internalisasi biaya atas dampak kerusakan lingkungan itu ke dalam struktur biaya perusahaan atau perpajakan yang berhubungan dengan dunia usaha. Pembiayaan ini dialokasikan untuk upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, serta rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup. Di samping itu, perlu juga diupayakan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menopang langkah-langkah kebijakan yang terkait dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pertanahan tersebut.

Perlu juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam penerbitan surat-surat pertanahan, di samping upaya-upaya untuk menguatkan basis dan saling tukar informasi tentang nilai ekonomis dari setiap jengkal lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat. Upaya-upaya ini dimaksudkan untuk memperbesar jaminan kepastian hukum dan keamanan dalam mengusahakan lahan yang bersangkutan, serta mengurangi dan meredam gejolak konflik seputar persoalan pertanahan di tingkat daerah yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

Di samping itu, menurut Akbar, perlu juga diupayakan revisi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan pada jangka menengah. Paling tidak, periode penguasaan lahan bagi masyarakat hendaknya diperpanjang hingga mendekati angka 100 tahun, demi meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik.³⁰

b. Sukses Pembangunan Politik dan Hukum

Sukses pembangunan politik dan hukum menurut Akbar meliputi tiga prioritas utama, yaitu: *pertama*, perbaikan keamanan dan rasa aman di

³⁰ *Ibid.*

masyarakat; *kedua*, penegakan hukum dan penghargaan terhadap HAM; dan *ketiga*, pengembangan demokrasi dan kemandirian daerah.

Pertama, berkenaan dengan soal perbaikan keamanan di tengah masyarakat, Akbar mengatakan bahwa sebenarnya angka tindak kejahatan bisa ditekan dengan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh unsur yang ada, terutama masyarakat dan aparat penegak keamanan. Sistem keamanan nasional perlu ditata ulang agar lebih efektif dalam menekan angka tindak kejahatan, dan terjaminnya proses sosial-politik secara demokratis. Akbar meyakini bahwa kondisi keamanan akan sangat berpengaruh pada terbentuknya kondisi politik yang stabil, dan pada gilirannya pada kondisi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bersama. Jika kerusuhan terjadi di mana-mana dan rasa aman masyarakat terganggu, maka dengan sendirinya laju pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Rasa aman adalah kunci terselenggaranya kegiatan-kegiatan nyata di segenap bidang dengan lancar dan baik.

Akbar juga berpendapat bahwa rasa aman dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dalam mengawal tegaknya hukum dan perundang-undangan dan menjamin ketertiban dalam masyarakat. Secara logis bisa dimengerti bahwa apabila hukum ditaati dengan baik, maka rasa aman pun akan meningkat. Untuk itu, menurut Akbar, perlu diupayakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum yang telah disepakati bersama.³¹

Kedua, sukses pembangunan politik dan hukum hendaknya juga dilakukan lewat penegakan hukum dan penghargaan terhadap HAM. Tentang hal ini Akbar

³¹ *Ibid.*

menilai perlunya upaya-upaya peningkatan pemahaman terhadap HAM dan sikap konsisten untuk melaksanakannya. Akbar mengingatkan agar berbagai pelanggaran berat terhadap HAM yang muncul dari penyalah-gunaan kekuasaan, sebagaimana ditemukan selama era pemerintahan Orde Baru, tidak terulang lagi.

Demikian pula, penghargaan terhadap HAM harus pula didukung dengan upaya penegakan hukum. Kedua hal ini mensyaratkan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan dan sejalan dengan aspirasi rakyat. Setiap masukan yang datang dari segenap komponen masyarakat harus diperhatikan, agar hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar ketika sebuah kebijakan dirumuskan. Akbar menegaskan bahwa langkah penegakan hukum dan HAM serta proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan wujud dari amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghargai hak warga negara dalam menjalankan roda pemerintahannya.³²

Ketiga, tentang pengembangan demokrasi dan kemandirian daerah, Akbar mengatakan bahwa demokrasi merupakan pilihan yang paling tepat dan terbaik untuk sistem pemerintahan Indonesia di masa sekarang ini. Demokrasi harus diupayakan perkembangannya untuk menjadi semakin kokoh, karena dengan sistem ini dimungkinkan tumbuhnya kontrol dan keseimbangan atas jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun tentang otonomi daerah, Akbar mengatakan bahwa kewenangan masing-masing daerah perlu diupayakan menuju suatu tingkat kemandirian yang

³² *Ibid.*

lebih baik. Langkah yang perlu diterapkan adalah yang mengarah pada kombinasi kewenangan daerah untuk dapat mengembangkan berbagai aspek kehidupan di daerah masing-masing berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk menciptakan interaksi secara ekonomi dengan daerah-daerah lain di sekitarnya, dan dengan wilayah ekonomi yang lebih luas.³³

c. Sukses Pembangunan Sosial dan Budaya

Sukses pembangunan sosial dan budaya menurut Akbar dilakukan lewat dua strategi berikut; yakni *pertama*, peningkatan keharmonisan dan kerukunan sosial; dan *kedua*, perbaikan peran perempuan dan kesetaraan jender.

Pertama, tentang peningkatan keharmonisan dan kerukunan sosial, Akbar mengatakan bahwa langkah yang perlu diambil adalah dengan meningkatkan keadilan sosial secara nyata. Untuk langkah itu, tidak boleh ada lagi golongan atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya. Pembangunan harus melibatkan peran aktif masyarakat dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, pembangunan tidak lagi dilaksanakan dari atas dan terpusat, akan tetapi seluruh warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk turut andil dalam pembangunan demi mewujukan keharmonisan sosial. Tidak boleh lagi ada perlakuan yang berbeda terhadap warga negara, sehingga rasa kebersamaan bisa terwujud dan solidaritas yang kokoh bisa ditegakkan.

Menurut Akbar, untuk mengurangi kesenjangan sosial, pada tahap awal diperlukan pemahaman dan keyakinan bahwa kerukunan sosial mutlak dibutuhkan dalam rangka membangun masa depan bangsa. Potensi konflik harus dikelola

³³ *Ibid.*

dengan sebaik mungkin, sehingga tidak menjurus ke arah konflik sosial yang terbuka. Pengalaman-pengalaman konflik di masa lalu bagi bangsa Indonesia hendaknya dijadikan pengalaman berharga, sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari.³⁴

Kedua, tentang perbaikan peran perempuan dan kesetaraan jender, Akbar berpendapat bahwa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan itu adalah lewat perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lebih memihak pada kesetaraan dan persamaan hak. Anggaran negara untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan haruslah proporsional. Demikian pula, sosialisasi di tengah masyarakat perlu senantiasa ditingkatkan untuk mengurangi anggapan bahwa tempat perempuan adalah di dapur. Sedangkan soal kekerasan terhadap perempuan dapat dikurangi secara bertahap apabila perempuan memiliki derajat pendidikan yang cukup, kesadaran hukum, dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Persamaan yang demikian itu akan menjamin kedudukan dan posisi yang sama bagi perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun di luarnya.

Dari sisi perempuan sendiri dibutuhkan sikap proaktif untuk mewujudkan kesetaraan tersebut. Langkah nyata peningkatan peran perempuan tidak hanya pada uluran tangan pemerintah saja. Kesetaraan jender tidak dapat diselesaikan hanya secara sepihak oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan upaya serius

³⁴ *Ibid.*

perempuan sendiri untuk ikut-serta dalam kerangka persamaan hak yang dimaksudkan di atas.³⁵

2. Kemandirian dan Kritisisme Partai Politik

Setelah presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada tahun 1998, dan kemudian bangsa Indonesia mengenal era baru yang disebut era reformasi, muncul wacana yang marak tentang perlunya bangsa ini untuk melakukan pemberahan-pemberahan ulang tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Akbar Tandjung termasuk salah seorang tokoh yang juga menyuarakan hal yang sama. Fokus pemberahan yang ia suarakan sebagai seorang politisi adalah di wilayah kehidupan politik bangsa.

Akbar mengatakan bahwa pemberahan kehidupan politik bangsa hendaknya diupayakan lewat reformasi politik, yang secara sederhana berarti membentuk kembali format politik agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan asas kedaulatan rakyat. Akbar menegaskan pentingnya bagi bangsa Indonesia pasca rezim Orde Baru untuk secara bersama-sama mencari dan merumuskan suatu format politik baru. Format politik tersebut dibangun di atas prinsip-prinsip politik yang terbuka, demokratis, egaliter, menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan prinsip-prinsip HAM, dan menopang upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Ia menambahkan bahwa format politik baru tersebut harus pula menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

³⁵ *Ibid..*

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di atas prinsip-prinsip itulah reformasi politik Indonesia mestinya ditegakkan.³⁶

Reformasi politik ke arah mekanisme dan praktik politik yang demokratis, menurut Akbar bukan saja berkenaan dengan formatnya saja, tapi juga substansinya. Tegasnya, harus ada persenyawaan antara format dan substansi mekanisme politik yang demokratis tersebut. Untuk itu, yang diperlukan bukan hanya pembaruan struktur politik saja, melainkan juga kultur atau budaya politik. Tidak diinginkan jika format politik sudah demokratis, sementara perilaku-perilaku politik (*political behaviour*) bangsa ini tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis. Jika demikian yang terjadi, maka sesungguhnya reformasi politik yang dicitakan itu telah timpang adanya.³⁷

Bagi Akbar, untuk mewujudkan reformasi politik tersebut, partai-partai politik sebagai tulang punggung format politik baru, dan organisasi-organisasi kekuatan masyarakat sebagai tulang punggung masyarakat, harus menjalankan fungsi-fungsinya secara utuh. Partai-partai politik harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menyerap, memadukan, mengartikulasikan, memperjuangkan aspirasi rakyat, melakukan rekrutmen kader, dan melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Fungsi yang disebut terakhir ini menjadi semakin penting dalam konteks demokratisasi yang semakin terbuka dewasa ini. Dengan adanya pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik, rakyat akan sadar akan hak-hak dan kewajibannya dalam suatu format politik baru yang

³⁶ Akbar Tandjung, *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional* (Jakarta: Golkar Press, 2003), hlm. 31.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 31-32.

demokratis itu. Singkatnya, reformasi politik mesti dijalankan lewat langkah restrukturisasi dan sekaligus lewat langkah-langkah rekulturisasi. Restrukturisasi diarahkan pada mekanisme demokrasi dan struktur partai politik, sementara rekulturisasi diarahkan pada pembudayaan nilai melalui kerja-kerja kultural, baik di lingkungan partai politik, maupun di kesadaran masyarakat politik Indonesia secara luas.³⁸

Selanjutnya, langkah reformasi politik itu hendaknya dimulai di lingkungan partai politik sendiri. Oleh karena itu, menurut Akbar, sebagai partai politik, Golkar hendaknya menjalankan fungsi-fungsi politiknya secara lebih transparan. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: *pertama*, sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat; *kedua*, sebagai alat rekrutmen kader politik dan kader bangsa; dan *ketiga*, sebagai sarana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat.³⁹

Fungsi-fungsi politik di lingkungan partai Golkar sebagaimana diungkapkan Akbar di atas menunjukkan pandangan Akbar tentang bagaimana peran partai politik harus dijalankan di era reformasi ini. Khusus terhadap Golkar, peran-peran tersebut dimaksudkan juga untuk mengubah citra Golkar dari partai yang dekat dengan –dan cenderung menjadi legitimasi– kekuasaan ke arah partai politik yang mandiri dan peka terhadap perkembangan sejarah.

Tuntutan agar Golkar harus lebih peka terhadap perkembangan sejarah di era reformasi ini merupakan sebuah keniscayaan, karena perkembangan sejarah

³⁸ *Ibid..*

³⁹ Akbar Tandjung, *Visi Golongan Karya Memasuki Era Baru: Pokok-Pokok Pikiran Politik Calon Ketua Umum Partai DPP Golongan Karya Periode 1998-2003* (Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, Jakarta 9-11 Juli 1998), hlm. 9-10.

kali ini telah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai arus utama yang menentukan. Akuntabilitas partai politik sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat harus terlaksana dengan sebaik-baiknya. Para elite politik tidak lagi bisa berbuat berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, tetapi harus sesuai dengan kepentingan rakyat yang menjadi basis konstituennya. Dengan demikian, transaksi politik antara rakyat dan elite politik tidak lagi dikhianati. Hal ini menjadi tugas yang sangat berat, terlebih lagi buat para politisi yang pernah menjadi penopang utama Orde Baru.

Menurut Akbar, sesungguhnya Golkar telah memiliki modal besar untuk mampu mendidik para kader partai yang memiliki komitmen untuk perbaikan tata politik nasional dan pemantangan demokrasi. Hal itu dikarenakan Golkar telah memiliki wahana perkaderan, pendidikan, dan partisipasi politik yang telah terancang dengan baik. Namun demikian, tantangan besar yang harus dihadapi Golkar adalah bagaimana memperbaiki stigma yang telah melekat pada dirinya sebagai partai yang harus ikut bertanggung-jawab atas dosa-dosa politik Orde Baru. Untuk itu, bias patrimonialisme dan sentralisme kekuasaan dalam kultur politik Golkar harus bisa diminimalisir semaksimal mungkin.

Latar belakang kebutuhan yang seperti itu terhadap Golkar membuat gagasan Akbar tentang pentingnya kemandirian bagi Golkar sebagai gagasan yang berani. Lebih lanjut Akbar menegaskan:

Kita telah belajar banyak dari dua pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru bahwa sentralisasi kekuasaan yang begitu besar di tingkat pusat khususnya pada figur seorang manusia, sesungguhnya adalah kekuasaan semu. Ia tidak berakar dalam masyarakat dan tidak ditunjang oleh daerah ... Organisasi kekuatan sosial politik yang mandiri adalah apabila organisasi kekuatan sosial politik itu mampu

menentukan dan menetapkan sendiri kebijakan dan menerapkan program-programnya tanpa dicampuri oleh lembaga-lembaga di luarnya.⁴⁰

Akbar memandang perlu bagi Golkar untuk memotong jalur struktural birokratis yang sering tidak menguntungkan di tubuh partai Golkar sendiri. Dalam hal ini, kewenangan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan harus diletakkan secara proporsional, sehingga tidak menjadi menjadi bumerang bagi kebijakan-kebijakan politik Golkar. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa kekuasaan personal ketua Dewan Pembinan Golkar seringkali sangat dominan dalam mengambil keputusan, sementara keputusan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan anggota dan kepentingan rakyat banyak yang menjadi basis konstituen partai.

Bagi Akbar, langkah untuk menjamin kemandirian bagi partai politik merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan di era reformasi ini. Partai politik yang mandiri akan menjamin berlangsungnya hubungan yang seimbang dan proporsional dengan pemerintah. Itu berarti partai politik akan dapat menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Partai politik bagi Akbar, haruslah solid, mandiri, responsif, mengakar, dan demokratis.⁴¹

Langkah restrukturasi dan rekulturasi yang berlangsung di dalam tubuh partai Golkar di masa kepemimpinan Akbar menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan kemandirian tersebut. Langkah-langkah tersebut juga merupakan komitmen Golkar terhadap agenda reformasi. Pembaruan internal di tubuh Golkar

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 12-13.

⁴¹ M. Deden Ridwan dan M. Muadzirin, *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 182.

itu dimaksudkan untuk memperbaiki sejumlah kesalahan yang lalu, dan diarahkan untuk mewujudkan Partai Golkar yang mandiri dan demokratis.⁴²

Akbar mengharapkan paradigma baru yang diupayakan lewat pembaruan di internal partai, Golkar mampu menjadi partai politik yang modern yang ditandai dengan kemandirian, demokratis, dan tegaknya prinsip kedaulatan di tangan anggota. Akbar menegaskan bahwa sebagai partai modern, Golkar harus bertumpu hanya pada kekuatannya sendiri dan tidak lagi mengandalkan kekuatan di luar dirinya. Golkar tidak boleh lagi sekedar menjadi partainya penguasa, dan diperlukan sebagai mesin politik atau alat legitimasi penguasa sebagaimana dalam paradigmanya yang lama.⁴³

Akbar menjelaskan langkah-langkah pemandirian partai politik itu secara lebih detail di dalam buku kecil yang berjudul *Menuju Kelahiran Partai Golkar: Pokok-Pokok Paradigma Baru* (1998). Buku yang berisi pokok-pokok pikiran Akbar ini diterbitkan setelah Akbar terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar 1998-2003. Di dalamnya Akbar menjelaskan dengan gamblang soal reformasi internal Golkar, yang meliputi demokratisasi sistem pemilihan Ketua Umum, perubahan AD/ART, dan perubahan struktur organisasi partai.

Di samping kemandirian, partai politik juga harus bisa menumbuhkan sikap kritis terhadap perjalanan proses demokratisasi di Indonesia. Bagi Akbar, sikap kritis adalah manifestasi dan implementasi dari fungsi partai politik itu sendiri. Akbar menampik anggapan sebagian kalangan yang meragukan cita-cita

⁴² Akbar Tandjung, *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional* (Jakarta: Golkar Press, 2003), hlm. 149.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 149-150.

kritisisme yang hendak dikembangkan di lingkungan partai politik, terutama Golkar, melalui fraksi-fraksinya di DPR.

Akbar menegaskan bahwa betapa pun kerasnya kritik yang dialamatkan kepada partai-partai politik akhir-akhir ini, namun idealisme untuk membangun demokrasi dan budaya kritis dalam berpolitik di Indonesia, tidak boleh mundur selangkah pun. Demokrasi tanpa keberadaan partai politik adalah tidak mungkin sama sekali, karena partai-partai politik adalah jantungnya demokrasi modern. Demokrasi Akbar lebih berjalan jika partai politik berfungsi dengan baik dengan mengembangkan semangat kritisisme, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Menurut Akbar, partai-partai politik tidak boleh mundur untuk terus mengembangkan kritisisme secara proporsional, melalui kader-kadernya yang ada di fraksinya masing-masing di DPR, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

C. Dimensi Aksi Politik Akbar Tandjung: Model *High Leadership*

Setelah pemerintahan Orde Baru runtuh, bangsa Indonesia memasuki era reformasi dan sekaligus menghadapi tantangan globalisasi di awal milenium ketiga yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan. Pada saat yang sama, bangsa ini pun sedang mengalami krisis multidimensi yang sangat berat. Dengan demikian, bangsa Indonesia menghadapi dua pekerjaan berat sekaligus. *Pertama*, mempersiapkan segenap infrastruktur yang diperlukan sehingga siap memasuki era baru yang sangat kompetitif tersebut; dan *kedua*, melakukan reformasi di segala bidang untuk mengatasi an sekaligus keluar dari krisis multidimensi.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 157.

Menurut Akbar, dalam era yang semacam itulah bangsa Indonesia memerlukan suatu bentuk kepemimpinan nasional yang relevan dengan zamannya, yakni zaman yang menuntut pembaruan dan perubahan yang mendasar di segala bidang. Sementara sebuah pembaruan dan perubahan tidak mungkin dilaksanakan dalam kondisi kevakuman kepemimpinan. Pemimpin yang relevan untuk bangsa ini di saat yang demikian itu, menurut Akbar, adalah pemimpin yang mampu membawa bangsa ini melakukan pembaruan dan perubahan untuk keluar dari krisis, sekaligus siap memasuki era globalisasi yang ditandai dengan kompetisi yang sangat ketat di segala bidang kehidupan tersebut. Untuk tujuan itu, kepemimpinan nasional harus didasarkan pada sikap-sikap sebagai berikut.⁴⁵

Pertama, pengertian secukupnya akan hakekat perubahan zaman dalam dimensi global. Ini sangat penting karena banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia yang merupakan kelanjutan atau memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi di dunia secara keseluruhan. Jika bangsa ini berbicara tentang HAM, demokrasi, *good governance*, keharusan memberantas KKN, dan seterusnya, maka sebenarnya bangsa ini sedang berbicara tentang nilai-nilai yang diterima, dihayati, dan dicoba laksanakan di mana pun di seluruh dunia.

Kedua, pengertian yang cukup tentang budaya bangsa sendiri sehingga dapat mengerti lebih tepat titik singgung antara pola budaya nasional dengan pola budaya dunia. Dengan mengetahui titik singgung secara persis ini, maka dapat diharap muncul kemampuan membuat antisipasi terhadap terjadinya jenis-jenis krisis tertentu.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 231.

Ketiga, akomodasi positif terhadap perubahan karena perubahan itu merupakan hal yang niscaya. Sikap ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan pada diri pemimpin sikap-sikap terbuka, menghargai pendapat yang berbeda, berpikir positif, inklusivistik, dan demokratis.

Sikap kepemimpinan yang semacam itulah yang dikembangkan Akbar selama menjadi Ketua Umum partai Golkar. Sikap tersebut ia anggap relevan dan ia jadikan sebagai salah satu referensi dalam upaya menciptakan kepemimpinan nasional sekarang ini. Akbar menilai bahwa di Indonesia, kepemimpinan masih memegang peran sentral. Apalagi bangsa ini masih berada dalam tahap menata ulang format dan sistem politi, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu, wacana tentang kepemimpinan nasional –terutama yang menyangkut mekanisme rekrutmen, seleksi, dan institusionalisasi demokrasi–penting dikembangkan untuk memperkaya alternatif pencarian corak kepemimpinan nasional yang relevan.⁴⁶

Mekanisme rekrutmen kepemimpinan nasional terkait dengan format politik yang sedang berlangsung. Saat ini, bangsa Indonesia berada pada era multi partai. Reformasi menuntut diimplementasikannya kebebasan yang seluas-luasnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika di awal masa reformasi dan bahkan hingga sepuluh tahun masa reformasi telah berlangsung, banyak sekali partai politik yang lahir dan ikut berkompetisi dalam dua kali pemilihan umum yang terakhir.

Kebebasan yang semacam itu dikarenakan faktor kemajemukan yang terkandung di dalam bangsa Indonesia sendiri. Kemajemukan bangsa ini adalah

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 233.

sesuatu yang telah *given* sejak dahulu. Dalam konteks itulah, yakni dalam era multi partai dan kemajemukan bangsa, persoalan yang paling menonjol di seputar kepemimpinan nasional adalah soal akseptabilitas seorang pemimpin. Pada hakekatnya, menurut Akbar, persoalan kepemimpinan adalah soal akseptabilitas, baik akseptabel bagi mayoritas partai-partai politik, maupun bagi mayoritas bangsa yang sangat majemuk ini.⁴⁷

Namun demikian, hal ini menjadi musykil setelah dua gelombang Pemilu dilaksanakan. Tidak sebuah partai politik pun dapat meloloskan calon presidennya tanpa dukungan partai politik lainnya. Di sinilah, koalisi, aliansi, dan kerjasama menjadi niscaya. Di sini pula setiap calon presiden diuji tingkat akseptabilitasnya di depan partai-partai yang lain. Semakin tinggi akseptabilitas seorang calon presiden dan semakin rendah tingkat resistensinya bagi kelompok yang lain, maka peluangnya menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika akseptabilitasnya di depan partai lain rendah dan tingkat resistensinya tinggi, maka peluangnya pun menjadi kecil.

Dalam konteks multi partai dan kemajemukan bangsa Indonesia, menurut Akbar, kepemimpinan nasional menjadi faktor yang sangat penting dan strategis untuk menjaga kerukunan dan integrasi nasional. Untuk itu, kepemimpinan yang akseptabel, *legitimate*, dan memiliki kualifikasi mengayomi semua golongan, menjadi sangat diperlukan. Akbar menegaskan bahwa yang ia maksud dengan pemimpin yang memiliki kualifikasi mengayomi semua golongan itu adalah

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 234.

model kepemimpinan tinggi (*high leadership*), dan bukan model kepemimpinan orang kuat (*strong man*).⁴⁸

Menurut Akbar, segenap komponen bangsa Indonesia menyadari bahwa untuk mengelola negara yang begitu majemuk ini tidak bisa lain harus ada kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang memimpin secara represif. Hanya orang kuat yang bertindak sebagai “Bapak Bangsa” yang akan mampu menjadi perekat kemajemukan itu. Tanpa orang kuat, maka integrasi nasional sulit dijaga. Namun demikian, saat ini telah muncul kesadaran yang meluas bahwa tampilnya “orang kuat” tidak lagi kondusif bagi proses demokrasi.

Dalam konteks itulah model kepemimpinan tinggi atau yang dikenal dengan *high leadership* relevan untuk dikembangkan. Pada masa lalu, barangkali kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) masih bisa diterima dengan segala impliksinya yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, di masa sekarang, sesuai dengan semangat reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis dan egaliter, kepemimpinan yang kuat dalam pengertian di atas sering dipandang tidak lagi kondusif bagi demokratisasi dan semangat egalitarianisme.

Akbar berpendapat bahwa terdapat dilema antara kepemimpinan yang kuat (*strong leadership/strong man*) dengan kepemimpinan yang biasa-biasa saja. Yang pertama cenderung mengutamakan stabilitas, keseragaman, regimentasi, loyalitas, dan karena itu kurang demokratis. Sementara yang kedua membuka peluang kebebasan tetapi seringkali tidak eksesif. Ekses dari kebebasan yang tanpa batas adalah orang menjadi bersikap berlebihan sehingga melonggarlah

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 238.

sendi-sendi kerukunan dan persatuan. Akbar mensinyalir bahwa Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Kita* telah mengingatkan bahwa demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarkhi, lambat-laun akan digantikan oleh diktator. Ini adalah hukum besi sejarah dunia. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Demokrasi di Indonesia, bagi Akbar, akan berjalan dengan baik jika didukung dengan model kepemimpinan tinggi di atas.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 239-240.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan dan eksplorasi terhadap topik penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua point berikut:

Pertama, etika politik merupakan bagian etika khusus dalam pembahasan di bidang etika. Sebagaimana dimaklumi, etika pada dasarnya merupakan salah satu cabang dari filsafat, yang langsung mempertanyakan praksis kehidupan manusia. Etika mempersoalkan pertimbangan nilai dalam tingkah laku manusia. Sebagai etika khusus, etika politik membahas prinsip-prinsip dasar etika dalam hubungannya dengan kewajiban manusia di ranah politik.

Etika politik lahir di Yunani dan mengemuka di zaman modern, di saat legitimasi kekuasaan raja dalam pandangan feodalisme mulai dipertanyakan dan digugat. Etika politik menggugat dan mempertanyakan segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dan meminta pertanggung-jawabannya pada prinsip-prinsip moral dasar. Dua pertanyaan yang coba dijawab oleh etika politik adalah soal bagaimana seharusnya bentuk lembaga-lembaga kenegaraan seperti hukum dan negara dan apa yang seharusnya menjadi tujuan dan sasaran segala kebijakan politik. Etika politik berkenaan dengan upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan publik yang demokratis, setara dan berkeadilan.

Pada perkembangannya, etika politik berdiri di atas dua pilar. *Pertama*, menyangkut prinsip-prinsip dasar etika politik kontemporer; dan *kedua*, soal dimensi-dimensi etika politik. Jika yang pertama merupakan panduan-panduan

dasar dalam penyelenggaraan kehidupan publik, maka yang kedua merupakan panduan atas kajian tentang etika politik.

Di Indonesia, wacana dan disiplin kajian tentang etika politik masih merupakan hal yang baru, terutama di kalangan para pelaku politik. Banyak kalangan yang mensinyalir bahwa perlaku politik para politisi justru mengabaikan nilai-nilai dasar dan dimensi-dimensi etika politik. Di Indonesia, orientasi utama seorang politisi ketika memasuki kehidupan politik hanya untuk meraih kekuasaan dan mengakumulasi keuntungan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Kondisi inilah yang mengarahkan tindakan politik di Indonesia pada pragmatisme, penyelewengan kekuasaan, irasionalitas dan amoralitas politik. Namun demikian, di Indonesia mulai muncul kegelisahan untuk menjadikan etika politik sebagai landasan dalam mewujudkan demokratisasi.

Kedua, etika politik diwacanakan dan dipraktekkan dalam aktivitas politik Akbar Tandjung melalui tiga dimensi etika politik. Masing-masing dimensi tersebut adalah dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik.

Pada dimensi tujuan, dimensi etis gagasan dan praktik politik Akbar dapat dilihat dalam visi dan ideasinya tentang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat madani. Sementara pada dimensi sarana, etika politik Akbar dapat ditelusuri lewat strategi membangun Indonesia Sejahtera yang ia usung, serta kemandirian dan rasionalitas partai politik yang ia suarakan dan praktikkan selama memimpin Golkar. Bagi Akbar, membangun Indonesia Sejahtera dapat diwujudkan lewat tiga strategi, yaitu *pertama*, sukses pembangunan ekonomi; *kedua*, sukses pembangunan politik dan hukum; serta *ketiga*, sukses pembangunan

sosial dan budaya. Sedangkan pada dimensi aksi, etika politik Akbar mengarah dan diimplementasikan dalam rangka mewujudkan model kepemimpinan tinggi (*high leadership*).

B. Saran-saran

Penelitian tentang etika politik sebagaimana telah penulis paparkan dalam skripsi ini merupakan titik awal yang harus diakui masih banyak menyisakan kekurangan, baik dari segi analisa, penggalian data dan segi-segi lainnya. Untuk penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang, penulis ingin menyarankan hal-hal berikut:

Pertama, hendaknya penelitian dan kajian yang lebih intens mengenai tema etika politik terus diusahakan, digiatkan, dan dikembangkan. Keinginan itu bertolak dari fenomena dewasa ini di ranah perpolitikan Indonesia yang membutuhkan standar-standar etis yang mengkritisi praktik politik para politisi negeri ini. Keinginan ini tentu juga dipicu oleh hasrat bangsa ini untuk bisa menjadi lebih demokratis, sehingga tidak merugikan salah satu kelompok yang menjadi komponen bangsa.

Kedua, belum banyak kajian tentang etika politik sebagaimana dipraktikkan oleh para politisi negeri ini telah dilakukan di lingkungan akademik. Penulis menilai bahwa kajian di bidang etika politik tidak saja melulu menyangkut hal-hal ideal di ranah politik, tetapi juga bertolak dari bagaimana hal tersebut dipraktekkan oleh para politisi, khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsen, Rita. *Sudut Gelap Kemajuan*. Yogyakarta: Lafadl, 2000
- Bailey, Stephen K. *American Politics and Goverment*. Washington DC: Voice of America Forum Lectures, 1973
- Bakker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis. *Metodologi Penulisan Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius, 1990
- Beetham, David. *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press, 2003
- Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius, 1975
- Cohen, Jean L. dan Arato, Andrew. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: MIT Press, 1993
- Hardiman, Fransisco Budi. *Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia, 2004
- Hargens, Boni. "Mengapa Politik Tidak Etis?", dalam *Harian Seputar Indonesia*, 1 Maret 2007. www.seputar-indonesia.com/edisi/cetak/opini-sore/mengapa-politik-tidak-etis
- Haryatmoko. "Etika Politik dan Civil Society" , dalam *Kompas*, 5 Juni 2000
- _____. "Dimensi-dimensi Etika Politik" , dalam *Kompas*, Rabu, 5 Maret 2003
- _____. "Etika Politik, Bukan Hanya Moralitas Politikus" , http://tumasouw.tripod.com/artikel/etika_politik_bukan_hanya_moralitas.htm
- _____. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003
- <http://www.bangakbar.com>
- <http://www.unhcr.ch/udhr/lang/eng.htm>
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999
- Lubis, Mokhtar. "Kata Pengantar", dalam Revitch, Diane dan Thernstrom, Abigail (eds.). *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Obor, 2005
- Madjid, Nurcholish. *Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999
- _____. "Sekapur Sirih", dalam Ridwan, M. Deden & Muhamd Jirin, M. *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003

- “Mengenal Bang Akbar Lebih Dekat”, dalam *Medium*, No. 93 TH. V 05-18 Mei 2008
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan, 2001
- Novianto, Kholid (dkk.). *Akbar Tandjung dan Partai Golkar Era Reformasi*. Bekasi: Sejati Press, 2004
- “Perubahan Terjadi Pasca-2014: Muncul Generasi Lebih Peduli HAM”, dalam *Kompas*, 28 November 2007
- Pontoh, Coen Husain. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. Yogyakarta: Resist Book, 2005
- Rahardjo, Dawam. *Masyarakat Madani, Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1998
- Ridwan, M. Deden & Muhamadjirin, M. *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Ridwan, M. Deden. “Mahasiswa dan ‘Cek Kosong’”, *Kompas*, 6 Mei 1999
- Shapiro, Ian *Asas Moral dalam Politik*. Jakarta: Obor, 2003
- _____. *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*. Jakarta: Obor, 2006
- Siregar, Evendhy M. *Akbar Tandjung Anak Desa Sorkam*. Jakarta: Pustaka Mari Belajar, 2000
- Sudarto. *Metodologi Penulisan Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996
- Sugiharto, I. Bambang dan Agus Rachmat W. *Wajah Baru Etika dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Surachmad, Winarno. *Pengantar Penulisan Filsafat: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1987
- Suseno, Frans Magnis. *13 Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 1997
- _____. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Tandjung, Akbar. *Visi Golongan Karya Memasuki Era Baru: Pokok-Pokok Pikiran Politik Calon Ketua Umum Partai DPP Golongan Karya Periode 1998-2003*. Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar, Jakarta 9-11 Juli 1998
- _____. “Fungsi Kontrol Gerakan Moral Mahasiswa Pasca Sidang Umum MPR 1999”, *Makalah*, disampaikan pada Dies Natalis LXXI PMKRI Cabang DKI Jakarta “Sanctus Robertus Bellarminus”. Jakarta 6 November 1999
- _____. “Memperkokoh Etika dan Solidaritas Bangsa Memperkuat Kedaulatan Rakyat Menuju Masyarakat Madani”, *Naskah Ceramah*, disampaikan pada

acara Pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam [PB HMI],
16 Januari 2000

- _____. “Sambutan Ketua DPR-RI pada Acara Orientasi/Pembekalan Wartawan Koordinatoriat DPR-RI”, *Makalah*, Jakarta, 7-9 April 2000
- _____. “Urgensi Pergerakan Mahasiswa dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah”, *Makalah*, disampaikan pada Kongres I Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia [ILMISPI]. Bandar Lampung, 17 April 2000
- _____. *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional*. Jakarta: Golkar Press, 2003
- _____. *Membangun Rakyat Sejahtera*. Jakarta: tanpa penerbit, 2004
- _____. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia, 2007

Wawancara dengan Akbar Tandjung, Jakarta: 20 Desember 2007.

Wawancara dengan Akbar Tandjung, Jakarta: 31 Mei 2008.

WMK, Anwari. *Bukan Sekadar Kata: Perjalanan Politik Akbar Tandjung*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005

CURRICULUM VITAE

Nama : Abbas
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Riau, 27 Juli 1981
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Kesehatan No 12 RT/RW 02/04 Kec. Sungai Batang Kab. Inhil Riau
Alamat Yogyakarta : Dsn. Maguwo No. 07B RT/RW 02/45 Kel. Maguwoharjo Kec. Depok Sleman Yogyakarta.
Nama Bapak : Arsyad (Petta Nessa)
Nama Ibu : Syamsiah

RIWAYAT PENDIDIKAN :

SDN Pasengerahan Riau lulus tahun 1994

MTs Arrisalah Slahung Ponorogo lulus tahun 1996

MA Arrisalah Slahung Ponorogo lulus tahun 1999

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan
Filsafat (angkatan 2001)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Pembina Pramuka GUDEP 03 PM Arrisalah Ponorogo 1997-1998
2. Anggota Salafiyyah Pondok modern Ar-risalah Ponorogo 1998-1999
3. Pengurus HMI Komisariat Ushuluddin UIN Suka Yogyakarta 2002-2003
4. Ketua Partai Sinar Pencerahan UIN Suka Yogyakarta 2003-2004
5. Pengurus HMI Cabang Yogyakarta 2004-2005
6. Pengurus HMI Cabang Yogyakarta 2005-2006
7. Sekretaris DPD Pemuda Islam DIY 2006-2010